



INDONESIA
BERDAULAT
ADIL DAN
MAKMUR

Katalog: 3303002.32



STATISTIK PERUMAHAN

PROVINSI JAWA BARAT

2025

VOLUME 9, 2026



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**



STATISTIK PERUMAHAN

PROVINSI JAWA BARAT 2025
VOLUME 9, 2026



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

STATISTIK PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT 2025

Volume 9, 2026

Katalog : 3303002.32
Nomor Publikasi : 32000.26030
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xiii+84 halaman

Penyusun Naskah : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
Penyunting : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
Pembuat Kover : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
Penerbit : ©Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
Dicetak oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
Sumber Ilustrasi : *freepik.com* dan *canva.com*

Dilarang memproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

STATISTIK PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT 2025

Volume 9, 2026

TIM PENYUSUN

Pengarah	: Margaretha Ari Anggorowati
Penanggung Jawab	: Isti Larasati Widiastuty
Penyunting	: Mohamad Jalaluddin
Pemeriksa Tabel	: Renie Wulandari Catur Desi Handayani
Penulis Naskah	: Partinah Muhamad Nurul Alam Hasyim
Pengolah Data	: Partinah Muhamad Nurul Alam Hasyim
Pembuat Infografis	: Neni Agustini
Pembuat Kover	: Partinah
Penata Letak	: Almira Utami

KATA PENGANTAR

Hak atas perumahan adalah hak asasi manusia yang mendasar, di mana setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hunian yang sehat, aman, dan terjangkau. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan hak atas perumahan dijamin dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian, perumahan yang layak dengan kondisi lingkungan yang baik dan sehat merupakan kebutuhan esensial setiap penduduk untuk mendukung tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Publikasi Statistik Perumahan Provinsi Jawa Barat 2025 menyajikan data dan informasi tentang perumahan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025. Dalam publikasi ini juga disertakan *Relative Standard Error (RSE)* yang merupakan bentuk tanggung jawab dalam menampilkan tingkat keakuratan data yang disajikan.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna data sebagai bahan rujukan dalam pembangunan kelanjutusiaan. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan umpan balik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan publikasi yang akan datang.

Bandung, Agustus 2026

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat

Margaretha Ari Anggorowati

DAFTAR ISI
STATISTIK PERUMAHAN
PROVINSI JAWA BARAT 2025
Volume 9, 2026

Halaman

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Penulisan.....	4
1.3 Sumber Data	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II STATUS KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN TEMPAT	
TINGGAL.....	9
2.1 Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal	9
2.2 Jenis Bukti Kepemilikan Tanah.....	12
BAB III KONDISI FISIK BANGUNAN TEMPAT TINGGAL	17
3.1 Atap Bangunan.....	17
3.2 Dinding Bangunan	19
3.3 Lantai Bangunan	21
BAB IV AIR DAN SANITASI	27
4.1 Sumber Air Minum.....	28
4.2 Sanitasi	31
4.2.1 Fasilitas Tempat BAB.....	31
4.2.2 Jenis Kloset.....	33
4.2.3 Tempat Pembuangan Akhir Tinja	35
4.3 Listrik.....	37
4.4 Bahan Bakar untuk Memasak.....	39

BAB V RUMAH LAYAK HUNI	43
5.1 Perkembangan Persentase Rumah Layak Huni	44
5.2 Kriteria/Komponen Rumah Layak Huni.....	47
DAFTAR PUSTAKA	55

<https://jabar.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan dan Karakteristik di Jawa Barat, 2025	10
Gambar 2	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Bangunan Milik Sendiri Menurut Bukti Kepemilikan Tanah dan Bangunan di Jawa Barat, 2025	14
Gambar 3	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas dan Karakteristik di Jawa Barat, 2025	18
Gambar 4	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas dan Karakteristik di Jawa Barat, 2025	20
Gambar 5	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas dan Karakteristik di Jawa Barat, 2025	22
Gambar 6	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama dan Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Jawa Barat, 2025	29
Gambar 7	Persentase Rumah Tangga dengan Lokasi Sumber/ Fasilitas Air Minum Utama Menurut Karakteristik di Jawa Barat, 2025	30
Gambar 9	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang Digunakan dan Karakteristik di Jawa Barat, 2025	34
Gambar 10	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Karakteristik di Jawa Barat, 2025	36

Gambar 11	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama Listrik PLN dan Karakteristik di Jawa Barat, 2025	38
Gambar 12	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan bakar Utama yang Digunakan untuk Memasak dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2025	40
Gambar 13	Persentase Rumah Layak Huni di Jawa Barat, 2023 – 2025	45
Gambar 14	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni di Jawa Barat, 2025	46
Gambar 15	Komponen Rumah Layak Huni di Jawa Barat, 2024 – 2025	48
Gambar 16	Komponen Rumah Layak Huni di Kota Sukabumi dan Kabupaten Indramayu, 2025	49
Gambar 17	Komponen Rumah Layak Huni di Kota Bandung, 2025	51

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan di Jawa Barat, 2025	59
Lampiran 2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap Terluas di Jawa Barat, 2025	60
Lampiran 3 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding Terluas di Jawa Barat, 2025	61
Lampiran 4 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas di Jawa Barat, 2025	62
Lampiran 5 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum Utama dan di Jawa Barat, 2025	63
Lampiran 6 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jarak Sumber Air Minum Utama ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Jawa Barat, 2025	64
Lampiran 7 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Akses Terhadap Air Minum Layak di Jawa Barat, 2025	65
Lampiran 8 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Jawa Barat, 2025	66
Lampiran 9 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset yang digunakan di Jawa Barat, 2025	67

Lampiran 10	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Jawa Barat, 2025	68
Lampiran 11	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak di Jawa Barat, 2025	69
Lampiran 12	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Akses Terhadap Sanitasi Layak di Jawa Barat, 2025	70
Lampiran 13	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Akses Terhadap Rumah Layak Huni di Jawa Barat, 2025	71
Lampiran 14	<i>Relative Standard Error</i> Persentase Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan Rumah Milik Sendiri di Jawa Barat, 2025	75
Lampiran 15	<i>Relative Standard Error</i> Persentase Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan Rumah Kontrak/Sewa di Jawa Barat, 2025	76
Lampiran 16	<i>Relative Standard Error</i> Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Rumah dengan Atap Genteng di Jawa Barat, 2025	77
Lampiran 17	<i>Relative Standard Error</i> Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Atap Asbes di Jawa Barat, 2025	78
Lampiran 18	<i>Relative Standard Error</i> Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Dinding Tembok di Jawa Barat, 2025	79

Lampiran 19	<i>Relative Standard Error</i> Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Lantai Keramik/Ubain/Tegel/Teraso/Parket/Vinil/Karpet di Jawa Barat, 2025	80
Lampiran 20	<i>Relative Standard Error</i> Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Utama Air Minum Berupa Air Kemasan Bermerek/Air Isi Ulang di Jawa Barat, 2025	81
Lampiran 21	<i>Relative Standard Error</i> Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Utama Air Minum Berupa Sumur Bor/Pompa di Jawa Barat, 2025...	82
Lampiran 22	<i>Relative Standard Error</i> Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Fasilitas BAB Hanya ART di Jawa Barat, 2025	83
Lampiran 23	<i>Relative Standard Error</i> Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kloset Jenis Leher Angsa di Jawa Barat, 2025	84



PENDAHULUAN



Latar Belakang



Tujuan Penulisan



Sumber Data



Sistematika Penulisan

Menurut UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagai kebutuhan dasar manusia, rumah bukan sekadar bangunan fisik yang digunakan sebagai tempat berteduh, tetapi juga merupakan tempat yang memberikan rasa aman dan nyaman untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditegaskan bahwa rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat, dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Dengan demikian, perumahan memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan manusia yang juga akan berimplikasi pada pembangunan nasional.

Permintaan akan kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Migrasi penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi dengan tujuan utama untuk mencari pekerjaan dan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik turut menambah tekanan terhadap ketersediaan hunian di wilayah perkotaan. Fenomena ini memunculkan tantangan dan permasalahan baru berupa kenaikan harga tanah, keterbatasan lahan, serta kebutuhan infrastruktur pendukung yang memadai.

Kebutuhan perumahan tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung. Hunian yang layak harus dilengkapi dengan akses air bersih, sanitasi yang memadai, jaringan listrik, serta fasilitas publik seperti sekolah, pusat kesehatan, dan fasilitas lainnya.

Oleh karena itu, pendekatan pemenuhan kebutuhan perumahan harus bersifat holistik, tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik bangunan, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan.

Dalam upaya untuk menangani permasalahan perumahan, pemerintah telah meluncurkan berbagai program kerja di bidang perumahan. Salah satu program utama adalah Program Sejuta Rumah (PSR) yang telah dimulai sejak tahun 2015. Program ini ditujukan untuk menyediakan hunian bagi MBR maupun non-MBR. Selain PSR, pemerintah juga mengembangkan skema pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). FLPP merupakan bentuk subsidi pembiayaan rumah yang memudahkan MBR untuk memiliki hunian. Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga meluncurkan program “Imah Merenah Hirup Tumaninah” untuk memberi kemudahan kepada masyarakat mendapatkan rumah.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan survei rutin yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengumpulkan berbagai variabel perumahan dalam upaya menghasilkan indikator perumahan yang diperlukan untuk pembangunan. Publikasi Statistik Perumahan Provinsi Jawa Barat 2025 diterbitkan setiap tahun untuk menampilkan berbagai indikator perumahan yang bersumber dari Susenas Maret.

1.2 Tujuan Penulisan

Publikasi ini disusun dengan tujuan mendukung strategi yang tepat bagi pembangunan di bidang perumahan. Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan komprehensif mengenai kondisi perumahan dan lingkungan yang ditempati masyarakat di Jawa Barat dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi program pemerintah.

1.3 Sumber Data

Data yang disajikan pada publikasi Statistik Perumahan Provinsi Jawa Barat 2025 bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi Statistik Perumahan Provinsi Jawa Barat 2025 ini secara struktur disajikan dalam lima bagian. Bab 1 pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan, dan sumber data yang digunakan serta sistematika penulisan. Selanjutnya, Bab 2 mengulas status kepemilikan tanah dan bangunan tempat tinggal, seperti status kepemilikan bangunan dan jenis bukti kepemilikan tanah di Provinsi Jawa Barat. Bab 3 mengulas kondisi fisik bangunan tempat tinggal seperti atap, dinding, dan lantai bangunan di Provinsi Jawa Barat, diikuti Bab 4 tentang kepemilikan akses terhadap sumber air minum dan sanitasi di Provinsi Jawa Barat seperti sumber air minum, sanitasi, listrik, dan bahan bakar untuk memasak. Dalam Bab 5 mengulas rumah layak huni, seperti perkembangan persentase rumah layak huni dan kriteria/komponen rumah layak huni.

2

KONDISI STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN DAN TANAH TEMPAT TINGGAL

83,54%

Rumah tangga status kepemilikan
bangunan tempat tinggalnya
adalah Milik Sendiri



5,36%

Kontrak/Sewa

11,10%

Bebas Sewa

11,10%

Dinas/Lainnya



57,49%

Rumah tangga yang menempati
rumah/bangunan milik sendiri dan
memiliki Bukti Kepemilikan Tanah
berupa **SHM** atas nama **ART**

7,46%

SHM bukan atas
nama ART

32,66%

Surat bukti lainnya

2,39%

Sertifikat selain
SHM

BAB II

STATUS KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL

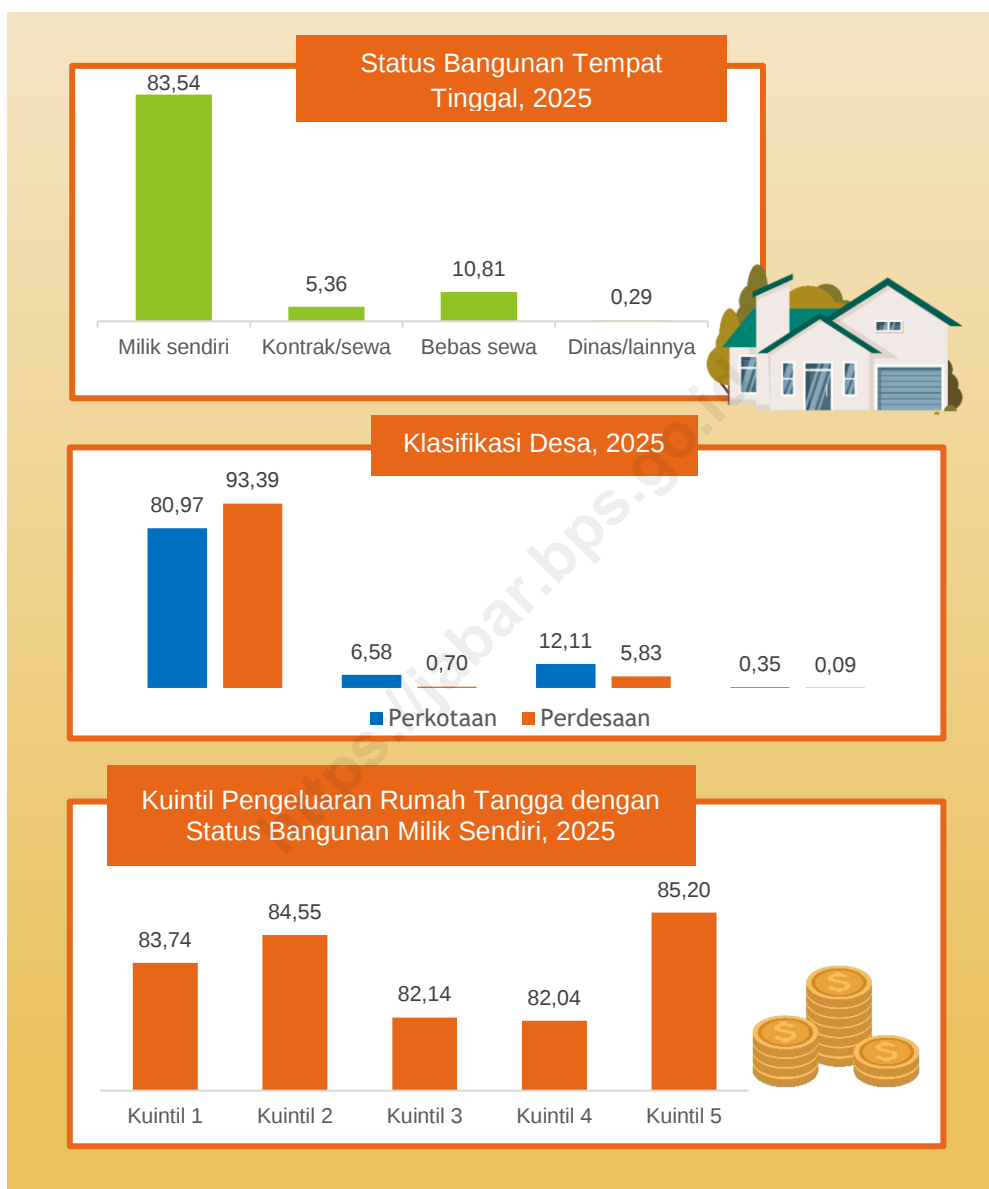
Tempat tinggal bukan hanya memenuhi fungsi fisik sebagai ruang berlindung, tetapi juga berperan krusial dalam menjamin hak asasi manusia atas rasa aman, stabilitas sosial, serta kesejahteraan jangka panjang (UN-Habitat). Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, hak atas tempat tinggal yang layak tidak dapat dipisahkan dari aspek kepastian bermukim (*legal security of tenure*), yaitu kondisi ketika seseorang atau rumah tangga memiliki jaminan hukum untuk menempati tanah atau bangunan tempat tinggal tanpa rasa takut akan penggusuran secara sepihak. Dalam metadata SDGs, terdapat indikator 1.4.2* yang berhubungan dengan penggunaan lahan untuk perumahan dan hunian yang memberikan kepastian bermukim. Indikator ini diukur dengan melihat status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati.

Bab ini akan membahas status kepemilikan bangunan tempat tinggal dan jenis bukti kepemilikannya sebagai cerminan sejauh mana keamanan bermukim telah terpenuhi. Data yang digunakan adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025.

2.1 Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal

Hak atas kepemilikan bangunan tempat tinggal merupakan bentuk pengakuan hukum yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk memiliki, menguasai, dan memanfaatkan tanah secara sah. Dalam Susenas Maret 2025 status kepemilikan bangunan antara lain rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas dan lainnya. Status rumah milik sendiri merupakan status rumah yang paling kuat. Rumah tangga dikatakan menempati milik sendiri apabila rumah/bangunan tempat tinggal yang

ditempati merupakan milik kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga, termasuk juga rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 1
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan dan Karakteristik di Jawa Barat, 2025

Gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2025, sebagian besar rumah tangga di Jawa Barat masih menempati rumah milik sendiri, yaitu sebesar 83,54 persen. Sementara itu terdapat 5,36 persen rumah tangga tinggal di rumah dengan status kontrak/sewa, 10,81 persen rumah tangga tinggal di rumah dengan status bebas sewa, dan 0,29 persen rumah tangga tinggal di rumah dengan status dinas/lainnya. Persentase ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk masih menggantungkan tempat tinggalnya pada kepemilikan langsung, meskipun terdapat sebagian yang masih tinggal dalam hunian yang berstatus kontrak/sewa.

Jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan klasifikasi desa, tingkat kepemilikan rumah milik sendiri lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan (80,97 persen berbanding 93,39 persen). Sebaliknya, hunian kontrak/sewa lebih banyak ditemui di daerah perkotaan dibandingkan dengan di daerah perdesaan (6,58 persen berbanding 0,70 persen). Pola tersebut dapat dikaitkan dengan dinamika urbanisasi, mobilitas kerja, serta harga tanah dan properti yang lebih tinggi di daerah perkotaan sehingga menyebabkan banyaknya rumah tangga memilih menyewa dibandingkan dengan membeli rumah.

Adapun dari aspek kesejahteraan yang dilihat melalui kuintil pengeluaran, tampak adanya pola yang menarik. Persentase rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri cenderung menurun terlihat dari kuintil 2 sampai kuintil 4, namun mengalami peningkatan kembali pada kuintil 5.

Pada tahun 2025, Kabupaten Pangandaran dan Subang merupakan kabupaten dengan persentase tertinggi rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri mencapai lebih dari 95 persen masing-masing sebesar 95,06 persen dan 95,19 persen. Sebaliknya kabupaten/kota dengan persentase terendah adalah Kota Cirebon dan Kota Cimahi masing-masing sebesar 61,23 persen dan 60,09 persen (Lampiran 1).

2.2 Jenis Bukti Kepemilikan Tanah

Selain status penguasaan tempat tinggal, indikator lain yang tidak kalah penting adalah bukti legal kepemilikan atas tanah dan bangunan tempat tinggal. Hak atas kepemilikan tanah di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan akses yang adil terhadap tempat tinggal yang layak. Dalam penjelasan Indikator 11.1.1.(a) pada SDGs, dinyatakan bahwa rumah tangga dikategorikan memiliki keamanan bermukim jika jenis bukti kepemilikan rumah/bangunan berupa SHM atas nama anggota rumah tangga (ART), SHM bukan atas nama anggota rumah tangga, dan sertifikat selain SHM. Adapun surat bukti lainnya seperti Girik, Letter C, dll. masih dikategorikan bukti kepemilikan yang kurang aman.

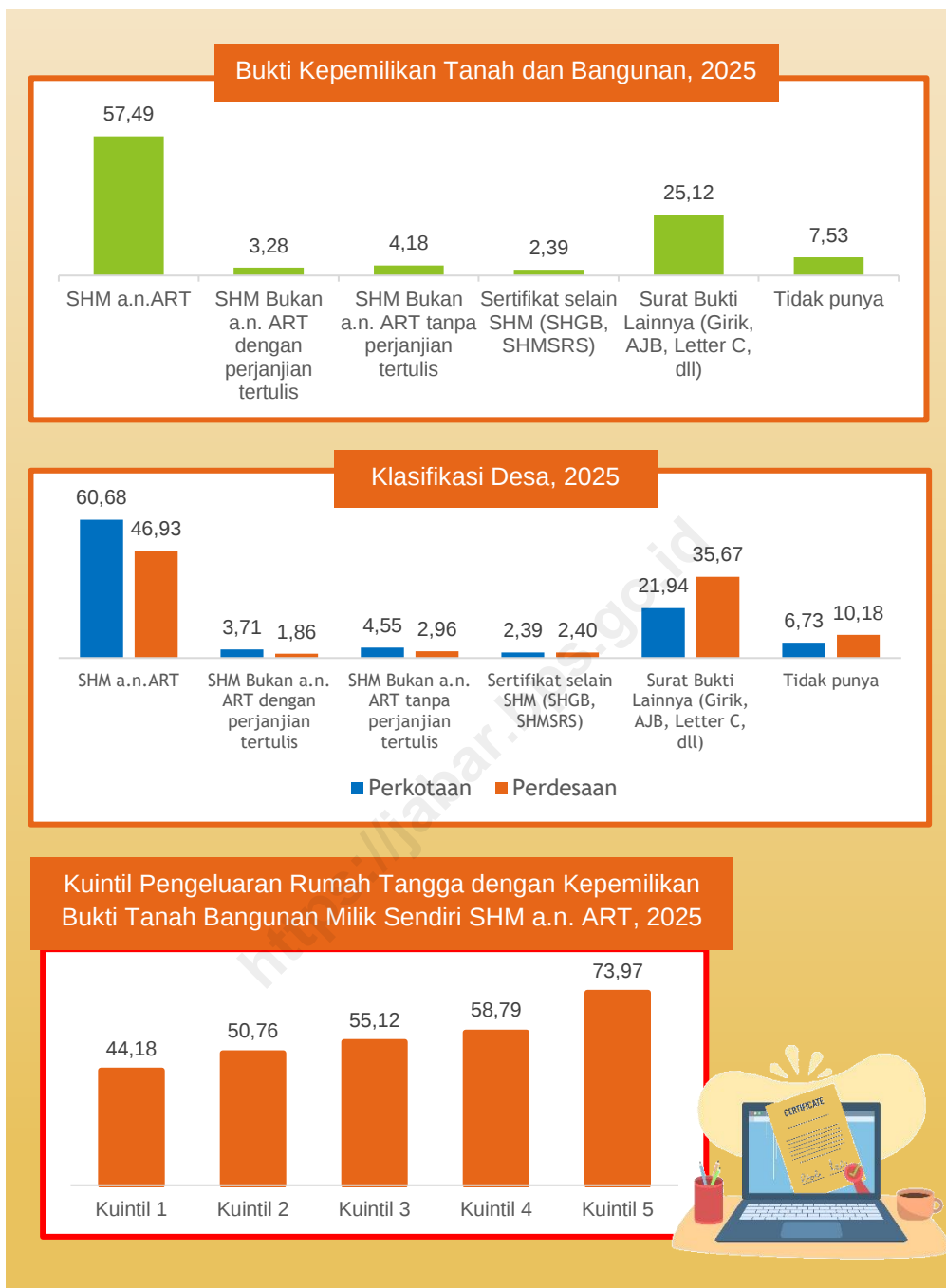
Berdasarkan data Susenas 2025 yang ditunjukkan oleh Gambar 2, sebanyak 57,49 persen rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama salah satu anggota rumah tangga. Sementara itu sebanyak 4,18 persen rumah tangga memiliki SHM bukan atas nama anggota rumah tangga tanpa perjanjian tertulis, dan sebanyak 3,28 persen rumah tangga memiliki SHM bukan atas nama anggota rumah tangga dengan perjanjian tertulis. Rumah tangga yang memiliki sertifikat lain selain SHM, seperti Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atau Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS), tercatat sebanyak 2,39 persen. Ketiganya termasuk dalam kategori memiliki keamanan bermukim menurut metadata SDGs indikator 11.1.1(a).

Namun demikian, masih terdapat 25,12 persen rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dengan bukti kepemilikan berupa girik, Akta Jual Beli (AJB), *Letter C*, atau lainnya, dan sebanyak 7,53 persen rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri tetapi tidak memiliki bukti kepemilikan tanah apapun. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada

tantangan dalam penataan administrasi pertanahan yang berdampak pada lemahnya jaminan hukum atas tempat tinggal.

Jika dilihat menurut klasifikasi desa, rumah tangga dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM atas nama anggota rumah tangga lebih tinggi di daerah perkotaan (60,68 persen) dibandingkan dengan di daerah perdesaan (46,93 persen). Ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat di daerah perkotaan terhadap pentingnya bukti kepemilikan atas tanah cukup tinggi dibandingkan dengan yang di perdesaan. Sama halnya dengan rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri tetapi tidak memiliki sertifikat lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan (10,18 persen berbanding 6,73 persen). Sementara itu bukti kepemilikan rumah berupa sertifikat lainnya seperti girik, AJB, *Letter C*, dan lainnya lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan di daerah perkotaan (35,67 persen berbanding 21,94 persen).

Dilihat menurut kuintil pengeluaran, rumah tangga yang memiliki SHM atas nama ART persentase tertinggi terdapat pada kuintil 5 sebesar 73,97 persen, hal ini sejalan dengan status kepemilikan bangunan rumah tangga dengan status milik sendiri persentase tertinggi terdapat pada rumah tangga pada kuintil 5. Sementara itu persentase terendah untuk kepemilikan bukti tanah dan bangunan berupa SHM atas nama ART terdapat pada kuintil 1 sebesar 44,18 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 2
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Bangunan Milik Sendiri Menurut Bukti Kepemilikan Tanah dan Bangunan di Jawa Barat, 2025

3

KONDISI FISIK BANGUNAN TEMPAT TINGGAL

Atap

78,49 % Rumah tangga
menggunakan **Genteng**



Lantai

84,56 %

Rumah tangga menggunakan
**Keramik/Ubun/Tegel/Teraso/
Parket/Vinil/Karpet**

Dinding

90,76 %
Rumah tangga
menggunakan
Tembok



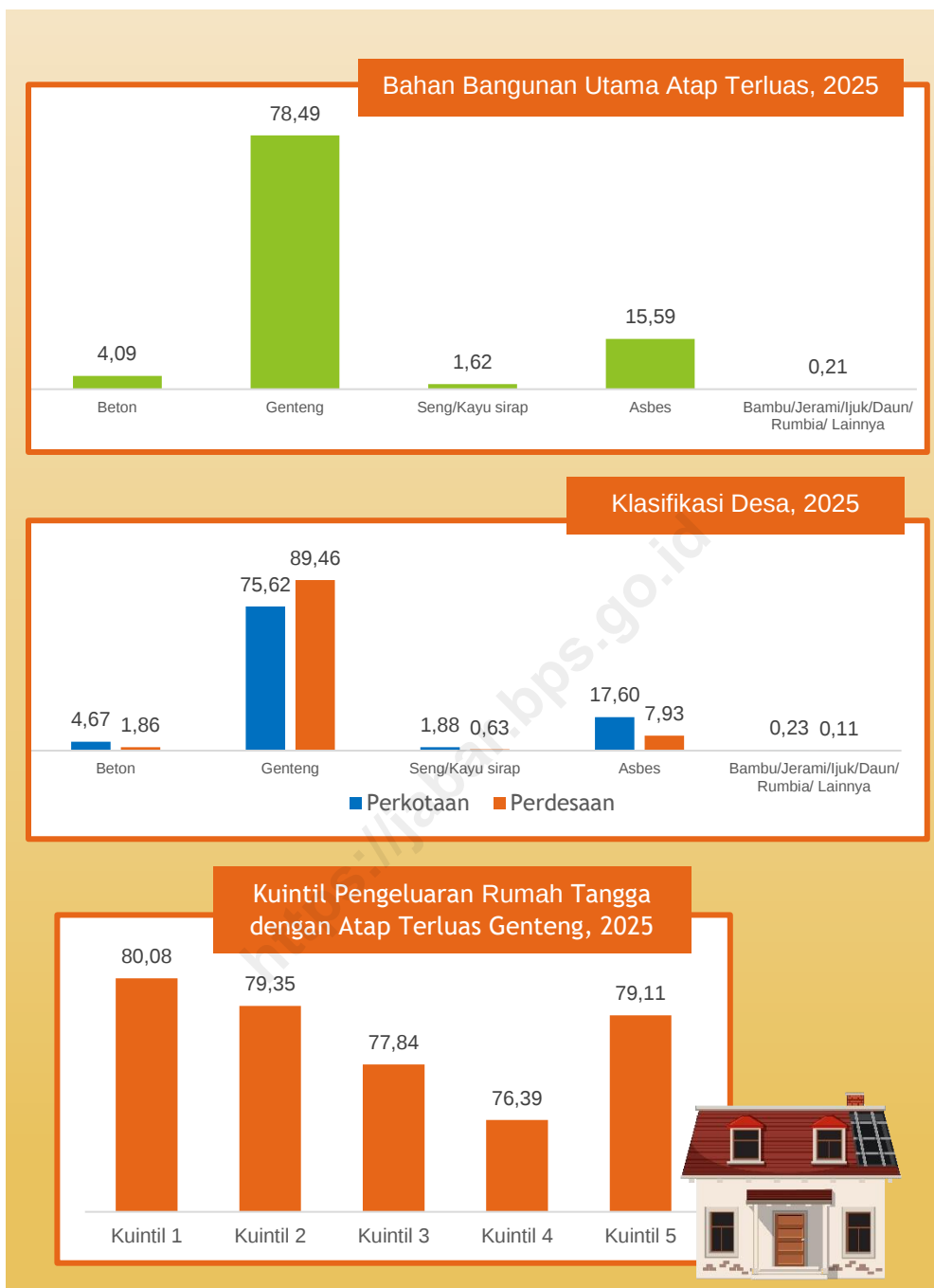
BAB III

KONDISI FISIK BANGUNAN TEMPAT TINGGAL

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan tempat tinggal. Selain itu, mengacu pada definisi global, ketahanan bangunan (*durable housing*) dan kecukupan luas bangunan tempat tinggal (*sufficient living space*) merupakan dua dari empat kriteria yang perlu dipenuhi dari sebuah bangunan tempat tinggal agar dapat dikatakan layak huni. Ketahanan bangunan dinilai dari jenis bahan bangunan utama atap, dinding, dan lantai rumah yang terluas. Sementara kecukupan luas tempat tinggal dilihat melalui batas minimum luas lantai per kapita bangunan tempat tinggal. Bab ini akan membahas terkait kondisi fisik bangunan tempat tinggal yang terdiri dari atap, dinding, dan lantai bangunan.

3.1 Atap Bangunan

Pemilihan jenis bahan bangunan rumah berkaitan dengan kekuatan bangunan sampai dengan dampak kesehatan yang ditimbulkan terhadap penghuninya. Pemilihan bahan bangunan yang bersifat permanen diharapkan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi cuaca, seperti hujan, panas, dingin, dan kelembaban (UN-Habitat, 2018). Selain itu, risiko kesehatan yang timbul atas dampak pemilihan bahan bangunan tempat tinggal juga perlu diperhatikan. Segala bentuk asbes diidentifikasi mengandung serat yang bersifat karsinogenik (WHO, 2024). Serat-serat asbes tersebut menjadi penyebab kanker seperti kanker paru-paru, laring, ovarium, dan bahkan menyebabkan kematian.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 3
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas dan Karakteristik di Jawa Barat, 2025

Gambar 3 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Jawa Barat menempati rumah dengan bangunan utama atap rumah terluas berupa genteng (78,49 persen). Proporsi rumah tangga yang menggunakan atap asbes yang dianggap oleh WHO berbahaya mencapai 15,59 persen. Diperlukan upaya advokasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan asbes terhadap kesehatan jika bahan tersebut digunakan sebagai atap bangunan tempat tinggal.

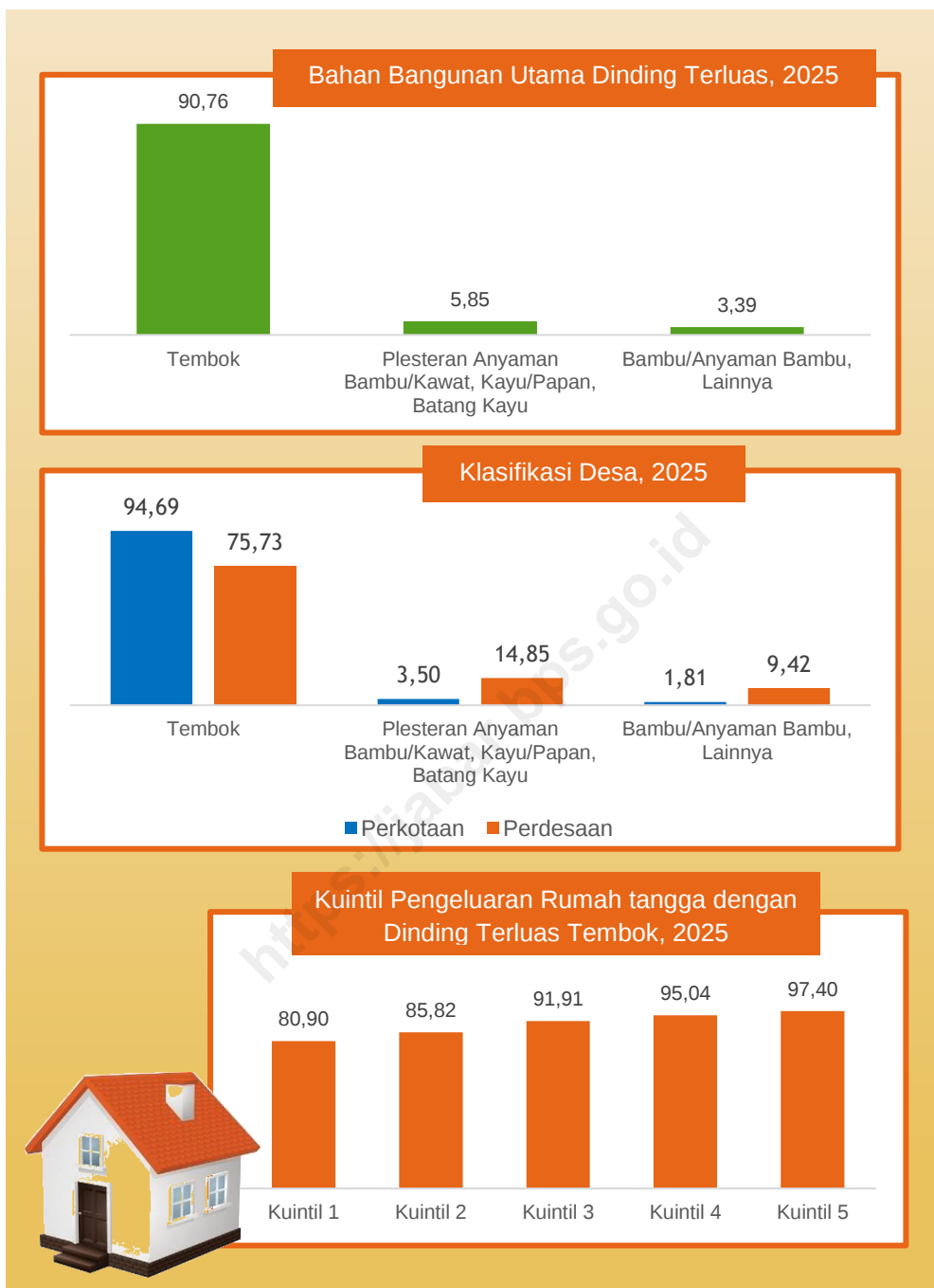
Penggunaan atap genteng lebih tinggi di perdesaan dibandingkan dengan perkotaan (89,46 persen berbanding 75,62 persen). Sementara di perkotaan rumah tangga yang menggunakan atap asbes persentasenya cukup tinggi yaitu 17,60 persen. Jika dilihat menurut kuintil pengeluaran, persentase tertinggi rumah tangga yang menggunakan atap genteng terdapat pada kuintil 1 sebanyak 80,08 persen.

Kabupaten/kota yang memiliki persentase tertinggi rumah tangga yang menempati rumah dengan bahan bangunan utama atap rumah terluas berupa asbes dengan capaian tertinggi terdapat di Kota Depok sebesar 44,94 persen (Lampiran 2).

3.2 Dinding Bangunan

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Apabila menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka bahan/jenis dinding terluasnya adalah yang kualitasnya lebih tinggi.

Pada tahun 2025, sebagian besar rumah tangga di Jawa Barat menempati rumah dengan bahan bangunan utama dinding terluas berupa tembok yaitu sebesar 90,76 persen. Tercatat 3,39 persen rumah tangga yang menempati rumah dengan dinding terluas berupa bambu/anyaman bambu/lainnya (Gambar 4).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 4
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas dan Karakteristik di Jawa Barat, 2025

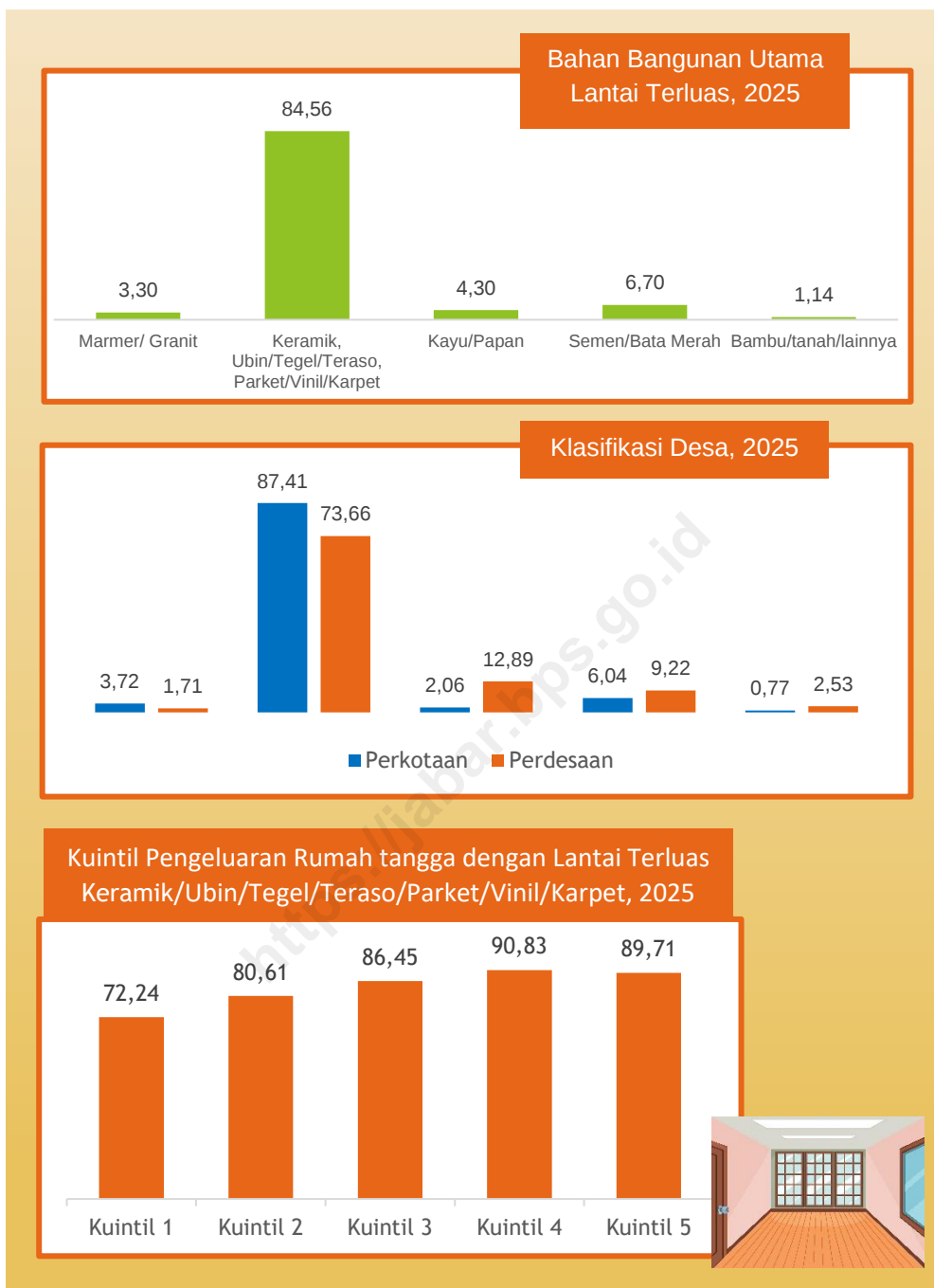
Jika dilihat menurut klasifikasi desa, persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan bahan bangunan utama dinding terluas berupa tembok di perkotaan mencapai 94,69 persen. Adapun di wilayah perdesaan rumah tangga dengan dinding terluas tembok sebesar 75,73 persen. Di daerah perdesaan masih cukup banyak rumah tangga yang menggunakan dinding berupa bambu/anyaman bambu/lainnya yaitu sebesar 1,81 persen.

Apabila dilihat menurut kuintil pengeluaran, rumah tangga dengan dinding terluas berupa tembok pada kuintil 1 sebesar 80,90 persen. Seiring dengan meningkatnya kuintil pengeluaran yang merupakan proksi dari tingkat kesejahteraan, semakin meningkat juga persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan dinding tembok.

Jika dirinci menurut kabupaten/kota, lebih dari 50 persen rumah tangga di Jawa Barat sudah menempati bangunan tempat tinggal dengan dinding terluas berupa tembok, di mana persentasenya di atas 90 persen. Adapun rumah tangga yang menempati rumah dengan dinding utama berupa tembok yang persentasenya terendah adalah Kabupaten Cianjur sebesar 63,62 persen (Lampiran 3).

3.3 Lantai Bangunan

Lantai adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegél/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, bambu, tanah, dan lainnya. Pada Gambar 5 terlihat bahwa pada tahun 2025 di Jawa Barat rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal dengan lantai terluas berupa marmer/granit sebesar 3,30 persen, sementara untuk keramik/ubin/tegél/teraso/vinil/karpet sebesar 84,56 persen. Terdapat 1,14 persen rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal dengan lantai terluas berupa bambu/tanah/lainnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 5
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas dan Karakteristik di Jawa Barat, 2025

Rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal dengan lantai terluas berupa keramik/ubin/tegel/teraso/vinil/parket lebih tinggi di daerah perkotaan (87,41 persen) dibandingkan di daerah perdesaan (73,66 persen). Apabila dilihat menurut kuintil pengeluaran, persentase tertinggi rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal dengan lantai terluas berupa keramik/ubin/tegel/teraso/vinil/parket ditunjukkan oleh kuintil 4 sebesar 90,83 persen.

Dilihat menurut kabupaten/kota, Kota Cimahi memiliki persentase tertinggi rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal dengan lantai terluas keramik/ubin/tegel/teraso/vinil/karpet masing-masing sebesar 93,69 persen. Adapun Kabupaten Cianjur merupakan kabupaten dengan rumah tangga yang menempati rumah dengan lantai terluas berupa marmer/granit/keramik dengan persentase terendah yaitu sebesar 60,48 persen (Lampiran 4).

4

FASILITAS RUMAH SEHAT

Sumber Air Minum Rumah Tangga

54,07 %

Rumah tangga di Jawa Barat menggunakan **air kemasan bermerek/air isi ulang** untuk kebutuhan minum sehari-hari



Sanitasi Rumah Tangga

Sebanyak **90,78%** rumah tangga di Jawa Barat menggunakan fasilitas BAB hanya untuk Anggota Rumah Tangga sendiri

Listrik Rumah Tangga

Rumah tangga di Jawa Barat menggunakan **Listrik dari PLN** **99,96 %**



Bahan Bakar Memasak Rumah Tangga

Sebanyak **94,98%** rumah tangga di Jawa Barat menggunakan elpiji/gaskota/biogas sebagai bahan bakar utama untuk memasak



BAB IV

AIR DAN SANITASI

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, negara mengupayakan ketahanan air, yaitu keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air. Dalam peraturan tersebut, disebutkan jika ketahanan air nasional diukur berdasarkan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang diantaranya melalui indikator akses terhadap air minum yang aman, merata, terjangkau, dan terlayani 100 persen; akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata mencapai 100 persen; peningkatan mutu air sesuai baku mutu air yang ditetapkan; efisiensi penggunaan air di semua sektor; jaminan keberlanjutan pasokan air; penerapan prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu; perlindungan dan pemulihan ekosistem terkait sumber daya air; dan pengurangan risiko kerugian akibat bencana terkait air.

Penyediaan air minum dan sanitasi layak menjadi prioritas nasional karena berdampak pada risiko kesehatan yang akan dihadapi akibat tidak tersedianya air minum dan sanitasi layak. Buruknya kualitas air, sanitasi, dan praktik higienis merupakan penyebab utama penyakit infeksi karena kotoran manusia (*Faecally-Transmitted Infections/FTIs*) seperti kolera dan diare. Kedua penyakit tersebut merupakan penyebab kematian tertinggi pada anak di bawah lima tahun (UNICEF, 2016). Lebih jauh lagi, risiko seorang anak untuk menjadi pendek karena terkena FTIs semakin tinggi. Sehingga penyediaan air, sanitasi, dan praktik higienis juga merupakan intervensi sensitif untuk menangani masalah kurang gizi pada anak (Cumming & Cairncross, 2016). Pada bab ini akan dibahas mengenai capaian indikator yang berhubungan dengan akses terhadap air minum dan sanitasi.

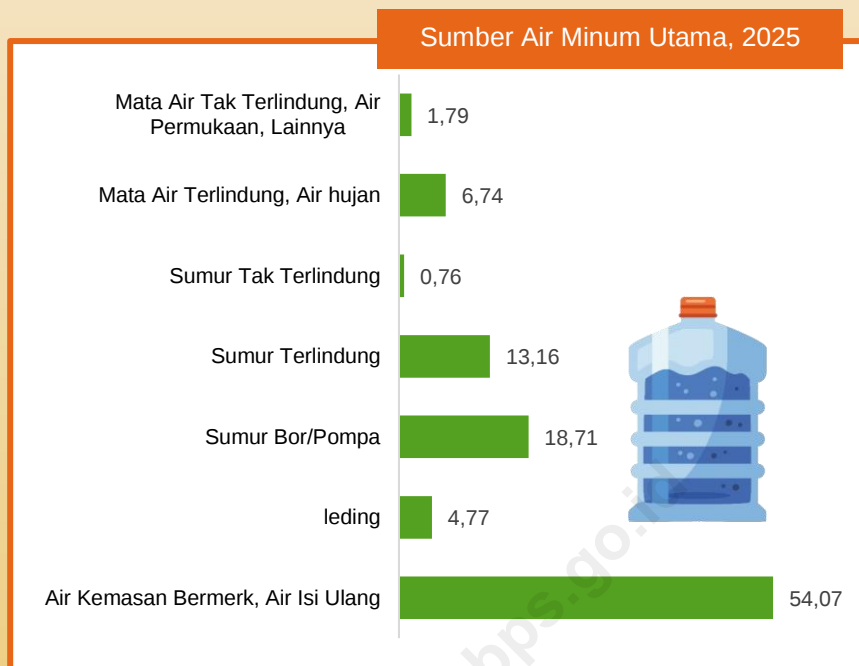
4.1 Sumber Air Minum

Air minum yang layak dan aman dikonsumsi adalah air yang tidak memiliki rasa, bau, atau warna, tidak mengandung bakteri, dan tidak mengandung bahan kimia melebihi batas yang diperbolehkan. Dalam Susenas 2025, sumber air minum utama terdiri dari air kemasan bermerek/air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tidak terlindung, mata air terlindung, mata air tidak terlindung, air hujan, air permukaan, dan lainnya).

Gambar 6 memperlihatkan bahwa pada tahun 2025, lebih dari separuh rumah tangga di Jawa Barat menggunakan air kemasan bermerk/air isi ulang sebagai sumber air minum utama (54,07 persen). Selain air isi kemasan bermerek/air ulang, sumber utama air untuk minum dengan persentase tertinggi selanjutnya adalah sumur bor/pompa (18,71 persen) dan sumur terlindung (13,16 persen).

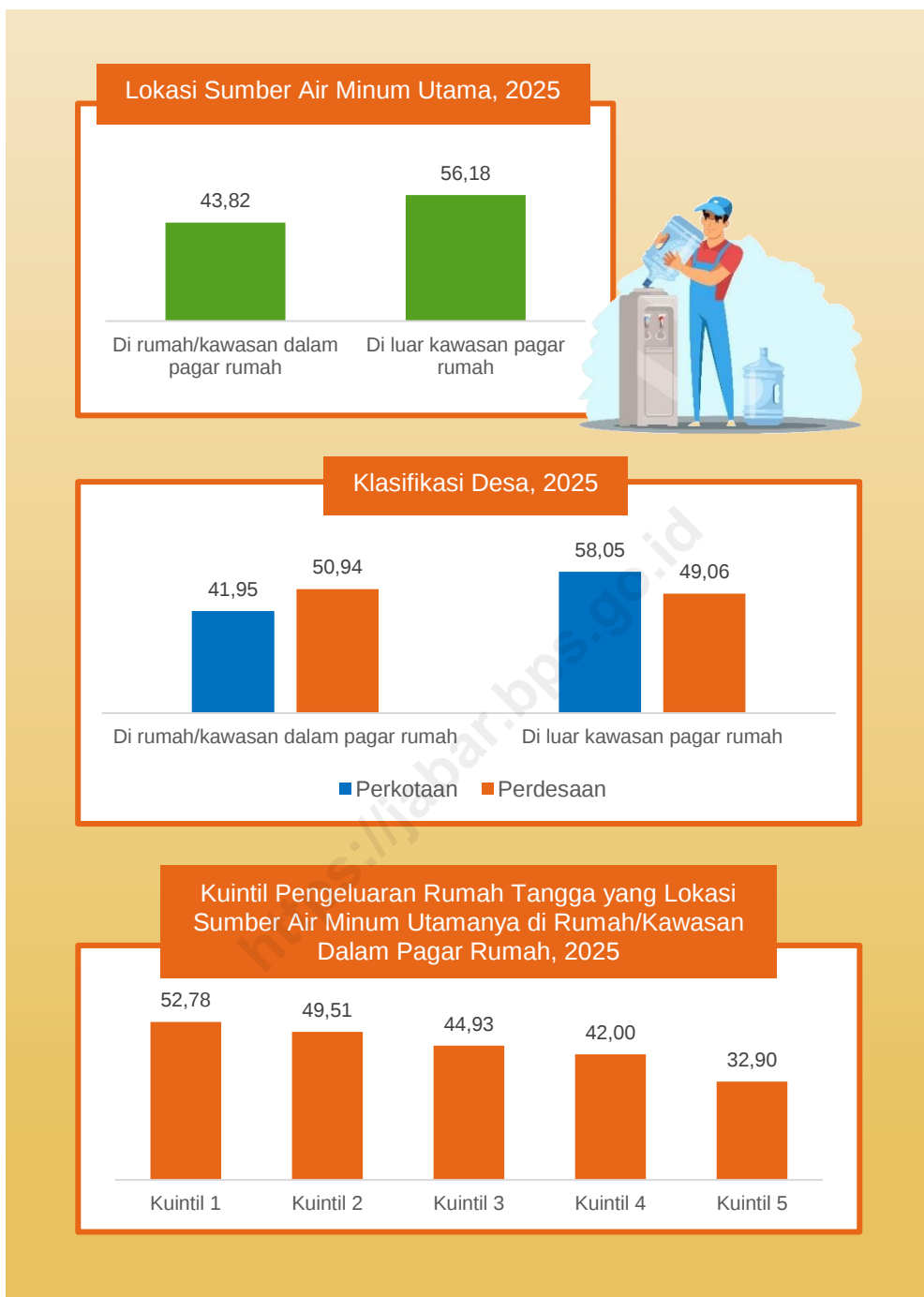
Penggunaan sumber air dari perpipaan, khususnya leding merupakan upaya untuk mencegah penggunaan air yang terkontaminasi. Meskipun dalam penggunaannya, distribusi air melalui jaringan perpipaan juga memerlukan perhatian di berbagai aspek seperti material, lokasi, tekanan air, dll. Pada tahun 2025, penggunaan air leding sebagai sumber air utama untuk minum baru sebesar 4,77 persen.

Jarak antara sumber air dengan tempat penampungan limbah/kotoran/tinja dapat berpengaruh terhadap kontaminasi bakteri dari kotoran manusia ke sumber air dan selanjutnya ke tubuh manusia. Semakin dekat jaraknya, maka risiko kontaminasi semakin tinggi. Pada tahun 2025, 35,86 persen rumah tangga di Jawa Barat yang menggunakan sumber air utama untuk minum dari sumur/pompa/mata air, memiliki jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat kurang dari 10 meter.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 6
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama dan Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Jawa Barat, 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 7
Persentase Rumah Tangga dengan Lokasi Sumber/ Fasilitas Air Minum Utama Menurut Karakteristik di Jawa Barat, 2025

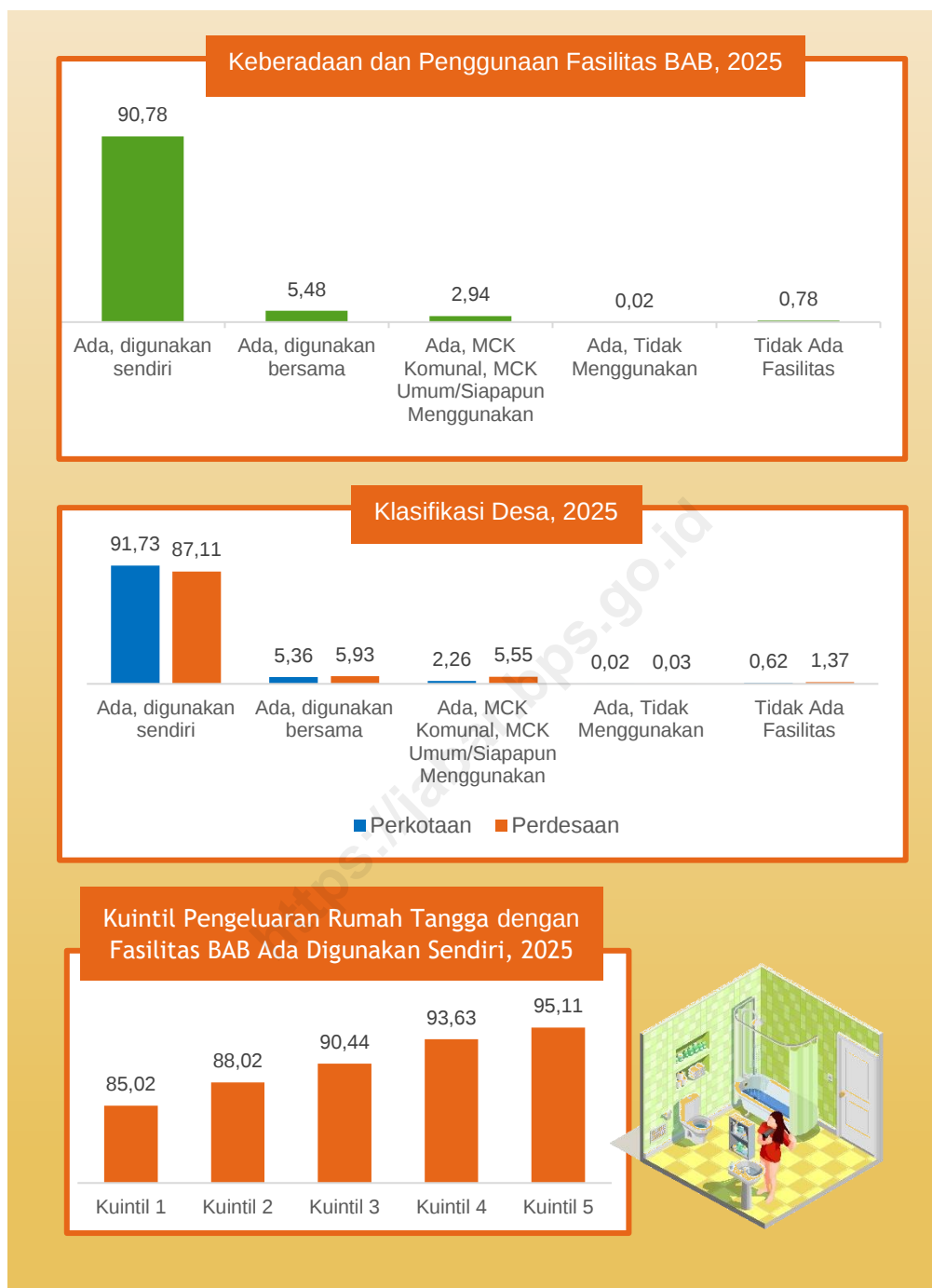
Gambar 7 memperlihatkan persentase rumah tangga terhadap lokasi sumber/fasilitas air minum utama. Pada tahun 2025 sebanyak 43,82 persen rumah tangga di Jawa Barat memiliki sumber/fasilitas air minum utama di rumah/kawasan dalam pagar rumah. Jika dilihat menurut klasifikasi desa, persentase rumah tangga yang memiliki sumber/fasilitas air minum utama di rumah/kawasan dalam pagar rumah untuk daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan yang perdesaan (41,95 persen berbanding 50,94 persen). Adapun jika dilihat dari kuintil pengeluaran yang merupakan proksi dari tingkat kesejahteraan rumah tangga, rumah tangga yang memiliki sumber/fasilitas air minum utama di rumah/kawasan dalam pagar ada kecenderungan penurunan persentase seiring dengan meningkatnya kuintil pengeluaran.

4.2 Sanitasi

Sanitasi dan perilaku higienis masyarakat merupakan salah satu aspek yang perlu dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam sanitasi, di antaranya fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB), jenis kloset yang digunakan, serta tempat pembuangan akhir tinja. Idealnya setiap rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar di rumahnya masing-masing. BPS melalui Susenas memotret data kepemilikan fasilitas tempat BAB oleh rumah tangga.

4.2.1 Fasilitas Tempat BAB

Fasilitas tempat BAB yang dimiliki rumah tangga di dalam Susenas dikelompokkan menjadi enam kategori yaitu memiliki fasilitas tempat BAB dan digunakan hanya Anggota Rumah Tangga (ART) sendiri, memiliki fasilitas tempat BAB dan digunakan bersama ART rumah tangga tertentu, MCK komunal, MCK umum, memiliki fasilitas tempat BAB tapi ART tidak menggunakan, serta tidak memiliki fasilitas tempat BAB.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 8
Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar (BAB) dan Karakteristik di Jawa Barat, 2025

Gambar 8 memperlihatkan persentase rumah tangga di Jawa Barat menurut kepemilikan serta penggunaan fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB). Pada tahun 2025, sebanyak 90,78 persen rumah tangga telah memiliki fasilitas tempat BAB yang digunakan sendiri. Sementara yang memiliki fasilitas tempat buang air besar dan digunakan bersama dengan anggota rumah tangga dari rumah tangga tertentu, di MCK komunal, atau di MCK umum totalnya sebesar 8,42 persen.

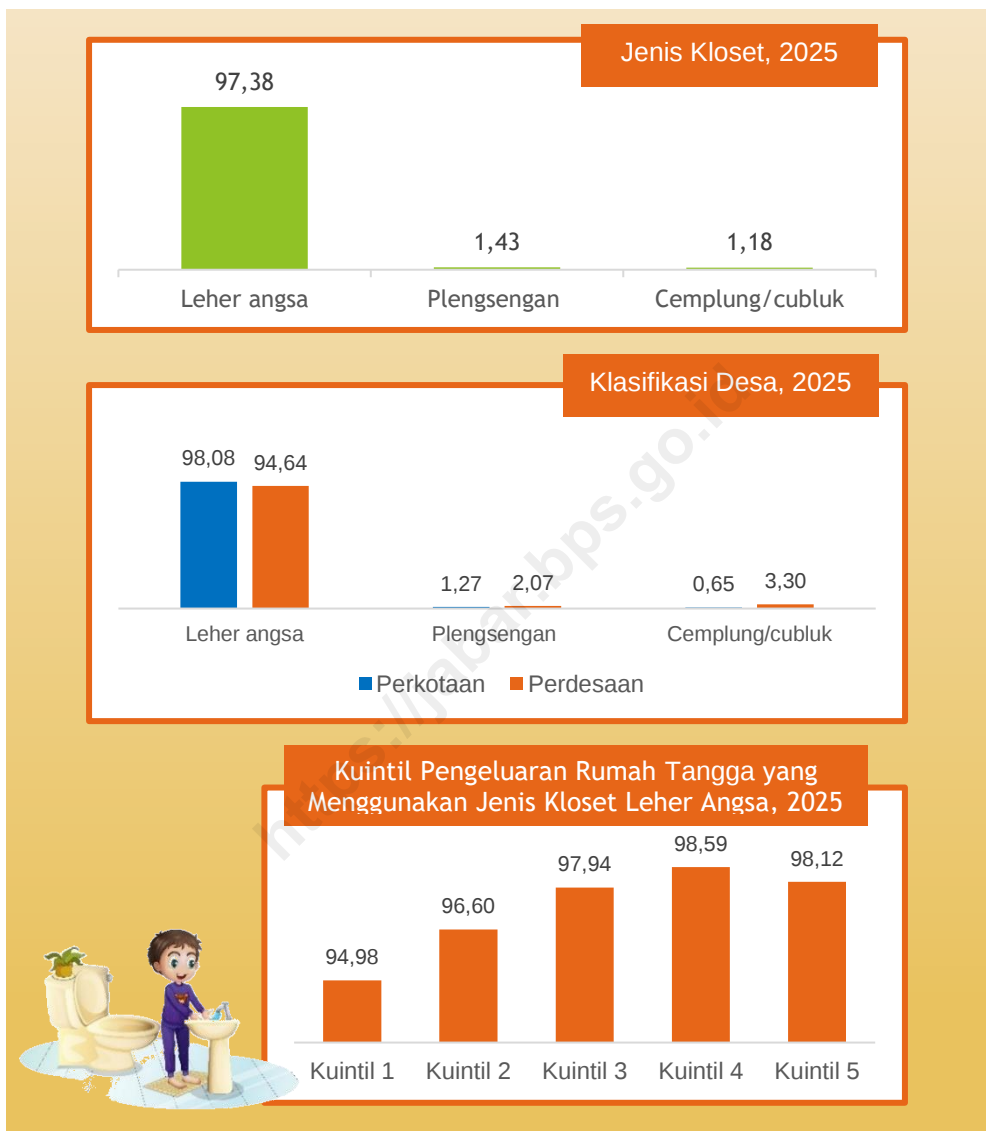
Pada Gambar 8 juga diperlihatkan bahwa persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan BAB sembarangan di tempat terbuka. Indikator ini mencakup rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar dan juga memiliki tempat buang air besar namun ART tidak menggunakan. Pada tahun 2025, terdapat 0,78 persen rumah tangga di Jawa Barat yang mempraktikkan BAB sembarangan di tempat terbuka.

Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat BAB dan digunakan hanya ART sendiri di daerah perkotaan lebih besar daripada di daerah perdesaan (91,73 persen berbanding 87,11 persen). Hal ini dikarenakan penduduk perkotaan cenderung lebih mampu secara finansial daripada penduduk perdesaan, sehingga lebih memiliki kemampuan untuk membeli/membuat fasilitas tempat BAB di rumahnya. Adapun jika dilihat dari kuintil pengeluaran, persentase ketersediaan fasilitas tempat BAB rumah tangga hanya ART sendiri yang menggunakan menunjukkan peningkatan seiring dengan adanya peningkatan kuintil pengeluaran.

4.2.2 Jenis Kloset

Kloset menjadi salah satu fasilitas paling penting yang harus ada di toilet atau kamar mandi. Kloset ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia perihal pembuangan, baik itu buang air besar ataupun buang air kecil. Jenis kloset yang digunakan untuk buang air besar cukup beragam, antara lain leher angsa, plengsengan, dan cemplung/cubluk. Kloset leher angsa merupakan jenis kloset yang paling baik dan memenuhi syarat

kesehatan. Pada kloset leher angsa terdapat alat yang berbentuk seperti leher angsa yang berfungsi mencegah timbulnya bau dan juga mencegah kotoran dihindangi lalat.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 9
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang Digunakan dan Karakteristik di Jawa Barat, 2025

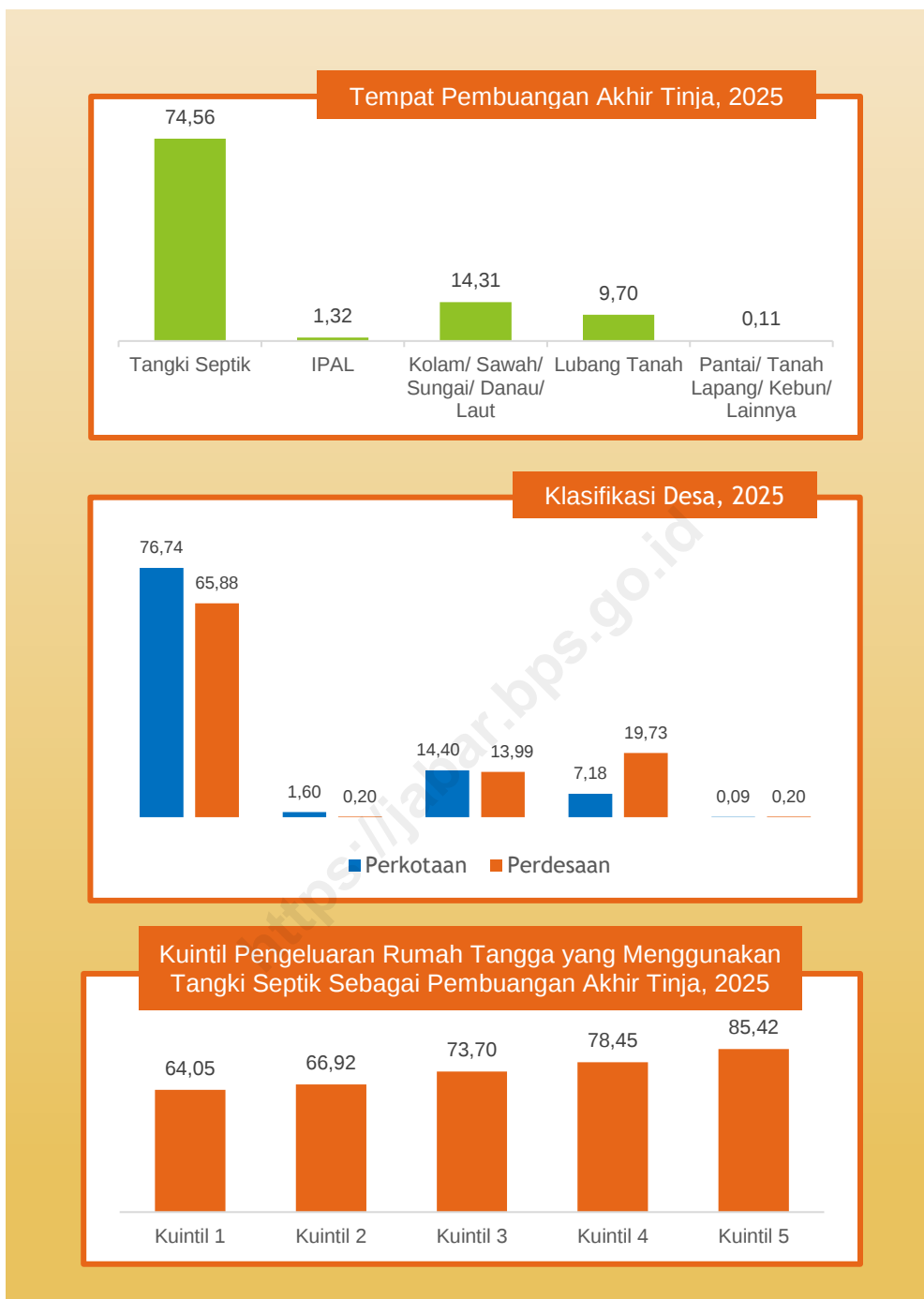
Gambar 9 memperlihatkan bahwa dari rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar yang digunakan sendiri, digunakan bersama dengan anggota rumah tangga lain, atau menggunakan MCK komunal, mayoritas telah menggunakan jenis kloset leher angsa (97,38 persen), plongsengan (dengan atau tanpa tutup) sebesar 1,43 persen dan cemplung/cubluk sebesar 1,18 persen.

Penggunaan kloset cemplung/cubluk lebih tinggi di daerah perdesaan daripada di daerah perkotaan (3,30 persen berbanding 0,65 persen). Adapun persentase rumah tangga dengan kloset jenis leher angsa persentase tertinggi terdapat pada kuintil empat.

4.2.3 Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Salah satu hal penting yang berkaitan erat dengan sanitasi adalah Tempat Pembuangan Akhir Tinja (TPAT). Limbah yang berasal dari tempat BAB baik tinja maupun air limbah seharusnya diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai maupun ke tanah. TPAT dikelompokkan menjadi enam, yaitu tangki septik, Instalasi Pembuangan Akhir Limbah (IPAL), kolam/sawah/ sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dan lainnya. Dari keenam kelompok TPAT tersebut, tangki septik dan IPAL, merupakan TPAT yang termasuk dalam komponen sanitasi layak. Penggunaan tangki septik maupun IPAL sebagai TPAT merupakan upaya optimal untuk mencegah lumpur tinja mencemari lingkungan sekitar.

Gambar 10 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Jawa Barat dengan fasilitas tempat BAB sendiri/bersama/MCK komunal memiliki TPAT berupa tangki septik sebesar 74,56 persen. Sementara itu penggunaan IPAL masih sangat rendah, yaitu sebesar 1,32 persen. Sebaliknya, masih ada sebanyak 9,70 persen rumah tangga dengan fasilitas tempat BAB sendiri/bersama/MCK komunal yang masih menggunakan lubang tanah sebagai TPAT.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 10
Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Karakteristik di Jawa Barat, 2025

Pada Gambar 10 juga terlihat bahwa penggunaan lubang tanah sebagai TPAT di daerah perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perkotaan (19,73 persen berbanding 7,18 persen. Seiring dengan meningkatnya kuintil pengeluaran semakin meningkat juga persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat BAB sendiri/bersama/MCK komunal memiliki TPAT berupa tangki septik.

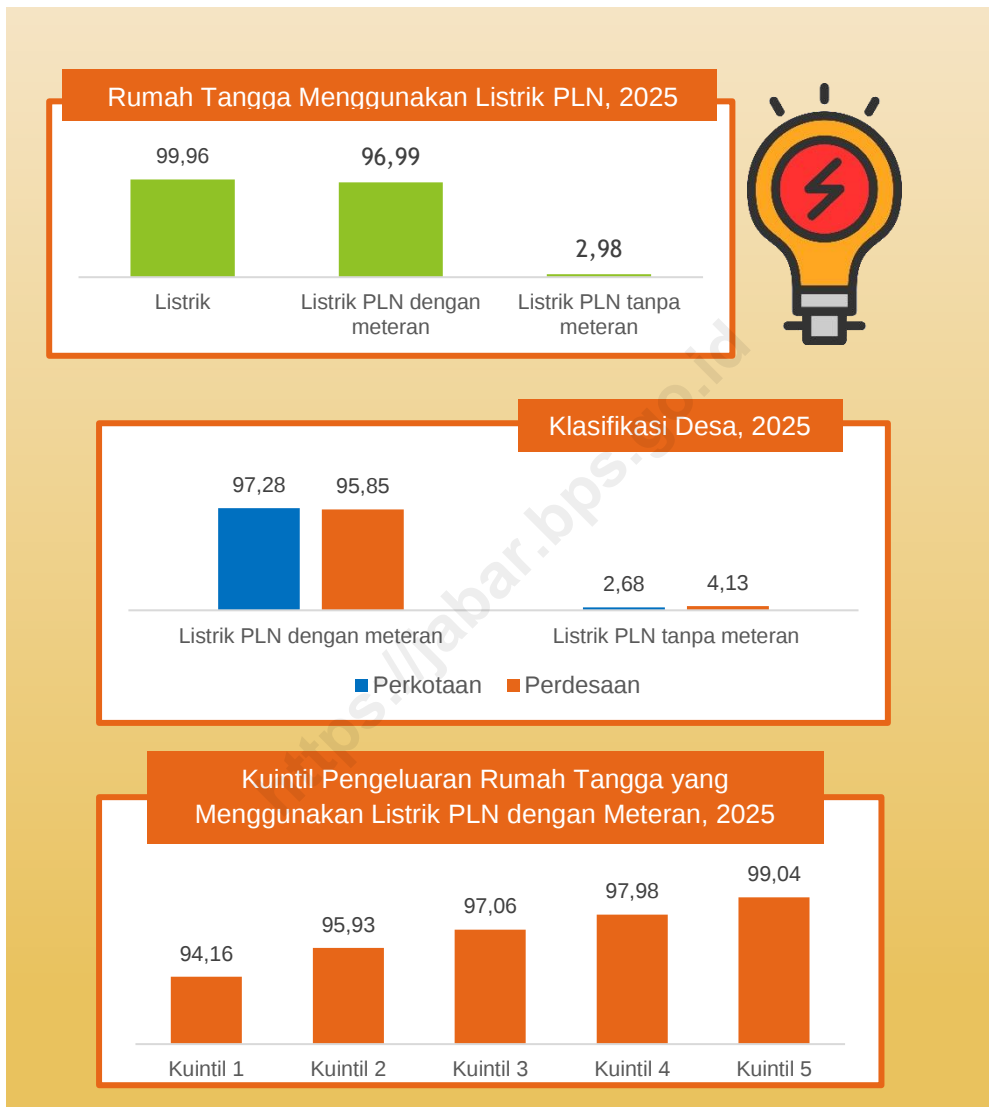
4.3 Listrik

Ketersediaan listrik merupakan kunci untuk mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah. Dengan adanya listrik, maka komunikasi juga menjadi lebih mudah sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Untuk itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan akses energi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dari sisi rumah tangga, pemerintah juga mendorong penggunaan energi yang bersumber dari listrik sebagai sumber energi bersih, terbarukan, dan ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang berasal dari gas alam. Listrik merupakan bentuk energi yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari dan berperan besar dalam mendorong pembangunan wilayah menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Gambar 10 menampilkan persentase rumah tangga berdasarkan sumber utama penerangan yang digunakan, yaitu listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) baik dengan meteran maupun tanpa meteran. Meskipun indikator ini berfokus pada sumber penerangan utama, data tersebut secara tidak langsung juga mencerminkan tingkat akses rumah tangga terhadap listrik.

Pada tahun 2025, sebesar 99,96 persen rumah tangga di Jawa Barat menggunakan listrik PLN sebagai sumber utama penerangan. Artinya, dari 100 rumah tangga, hampir seluruh rumah tangga telah menggunakan listrik PLN. Sementara itu, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dengan meteran sebanyak 96,99 persen, sedangkan persentase rumah

tangga yang menggunakan listrik PLN tanpa meteran sebanyak 2,98 persen. sebagai sumber penerangan utama mencapai 1,09 persen (Gambar 5.1). Tingginya penggunaan listrik PLN menunjukkan bahwa layanan kelistrikan telah menjangkau sebagian besar rumah tangga di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

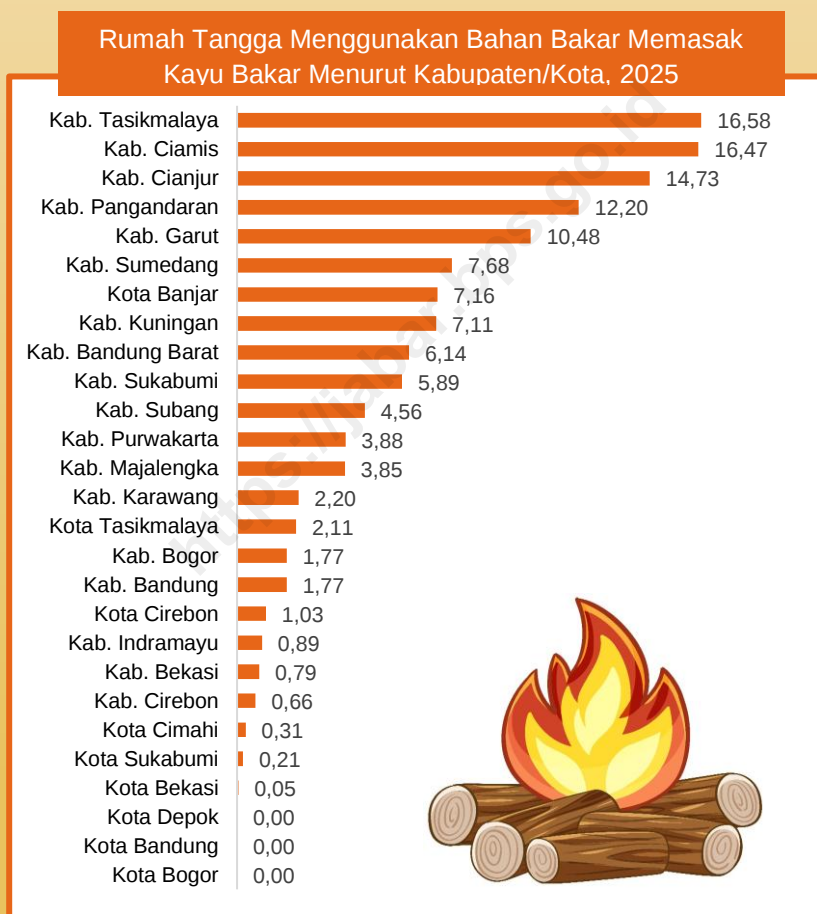
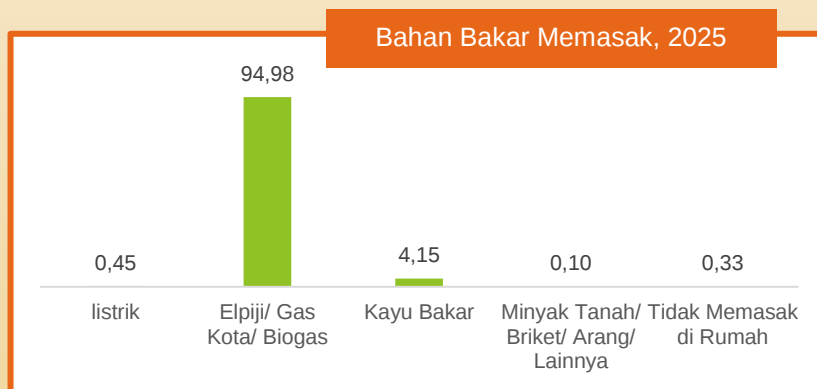
Gambar 11
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama Listrik PLN dan Karakteristik di Jawa Barat, 2025

Jika dilihat berdasarkan klasifikasi desa, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dengan meteran lebih besar di daerah perkotaan dibandingkan dengan di daerah perdesaan (97,28 persen berbanding 95,85 persen). Sebaliknya, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN tanpa meteran lebih banyak di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan (4,13 persen berbanding 2,68 persen).

4.4 Bahan Bakar untuk Memasak

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian Tujuan 7 pada SDGs yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua adalah rasio penggunaan gas rumah tangga (Indikator 7.1.2.(b)). Indikator ini digunakan untuk melihat proporsi rumah tangga yang sudah memanfaatkan penggunaan gas sebagai bahan bakar untuk memasak yang lebih bersih dan aman.

Bahan bakar gas sebagai bahan bakar utama untuk memasak meliputi LPG 3 kg, LPG 5,5 kg, LPG 12 kg, gas kota, dan biogas. Pada tahun 2025, sebesar 94,98 persen rumah tangga di Jawa Barat menggunakan gas sebagai bahan bakar utama untuk kegiatan memasak, sedangkan rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama memasak sebesar 4,15 persen (Gambar 12). Secara keseluruhan, pemanfaatan gas sebagai bahan bakar utama sudah merata di hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 12
Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama yang Digunakan untuk Memasak dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2025



RUMAH LAYAK HUNI

Pada tahun 2025,

58,46%

rumah tangga di Jawa Barat tinggal di rumah layak huni.



Komponen Rumah Layak Huni



95,84%

rumah tangga di Jawa Barat memiliki akses terhadap Air Minum Layak

Sebanyak **76,20%** rumah tangga di Jawa Barat memiliki akses terhadap Sanitasi Layak



Sebanyak **80,63%**

rumah tangga di Jawa Barat memiliki Ketahanan Bangunan



Sebanyak **95,11%** rumah tangga di Jawa Barat memiliki Luas Lantai $\geq 7,2 \text{ m}^2$



BAB V

RUMAH LAYAK HUNI

Akses terhadap rumah layak huni merupakan salah satu tujuan pada SDGs yaitu pada Target 11.1. Pada target tersebut disebutkan bahwa pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Capaian target tersebut diukur menggunakan Indikator 11.1.1.(a) yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Tempat tinggal dikatakan memiliki hunian yang layak jika memenuhi empat kriteria berikut:

1. Ketahanan bangunan (*durabel housing*)

Ketahanan bangunan dilihat dari bahan bangunan utama atap, dinding dan lantai rumah terluas yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bahan bangunan utama atap rumah terluas berupa beton, genteng, kayu/sirap, dan seng.
- b. Bahan bangunan dinding rumah terluas berupa tembok/GRC *board*, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu.
- c. Bahan bangunan utama lantai rumah terluas berupa marmer/granit/keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/ bata merah.

2. Kecukupan luas lantai (*sufficient living space*)

Rumah dikatakan memenuhi kecukupan luas lantai jika memiliki luas lantai per kapita minimal 7,2 m². Luas lantai per kapita dihitung dari luas lantai bangunan tempat tinggal dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga.

3. Memiliki akses terhadap air minum layak.

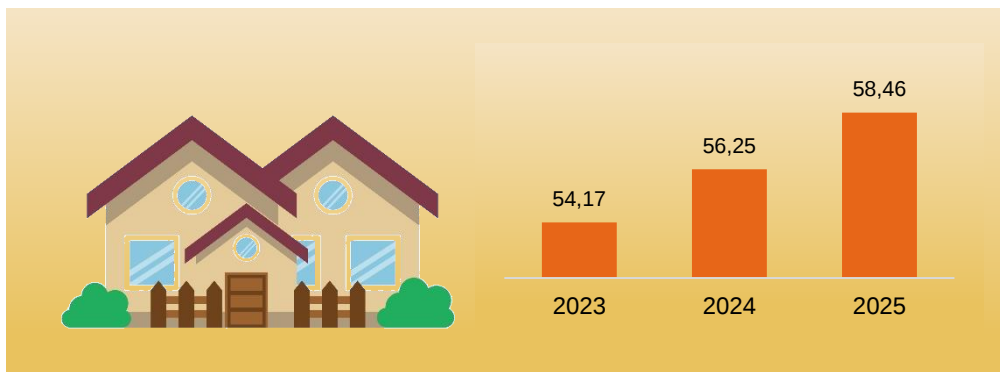
Sumber air minum dikatakan layak jika rumah tangga menggunakan sumber air minum utama berupa air terlindungi, yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan. Sementara itu, jika rumah tangga menggunakan sumber air minum utama berupa air kemasan bermerek atau air isi ulang, sumber air utama yang digunakan untuk mandi/cuci/dll, harus berupa air terlindungi seperti yang telah disebutkan agar dapat dikatakan memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.

4. Memiliki akses terhadap sanitasi layak (*access to adequate sanitation*).

Akses terhadap sanitasi layak diukur melalui tiga kriteria, yaitu kepemilikan fasilitas tempat buang air besar, jenis kloset, dan tempat pembuangan akhir tinja. Sanitasi dikatakan layak jika fasilitas tempat buang air besar digunakan hanya ART sendiri, digunakan Bersama ART rumah tangga tertentu, atau di MCK komunal. Kloset yang digunakan adalah leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangka septic atau IPAL. Khusus di daerah perdesaan, tempat pembuangan akhir tinja dapat berupa lubang tanah.

5.1 Perkembangan Persentase Rumah Layak Huni

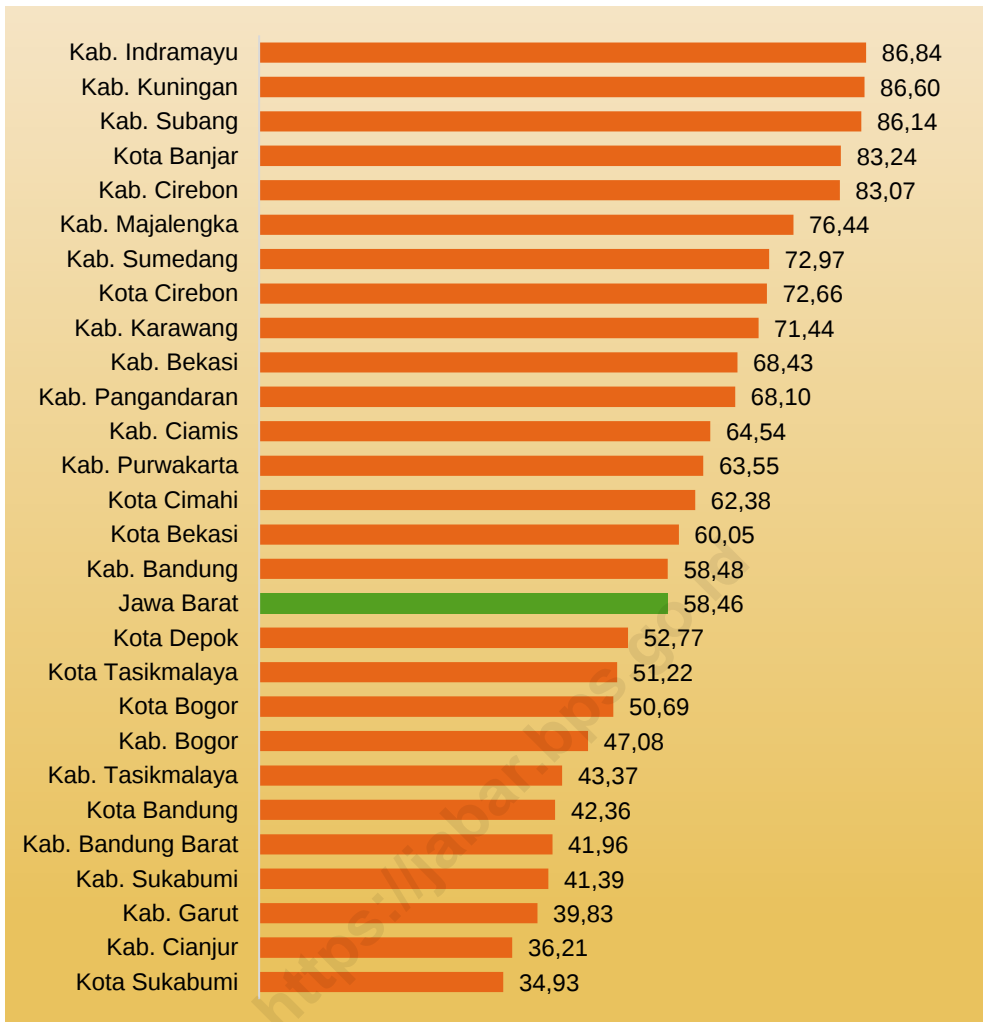
Persentase rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni di Jawa Barat terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, persentase RLH sebesar 54,17 persen, lalu naik di tahun 2024 menjadi 56,25 persen dan pada tahun 2025 naik kembali menjadi 58,46 persen. Meski tren tiga tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan, rumah tangga yang menempati rumah layak huni di Jawa Barat belum merata.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023–2025

Gambar 13
Persentase Rumah Layak Huni di Jawa Barat, 2023–2025

Untuk level kabupaten/kota, besaran persentase rumah layak huni tahun 2025 sangat beragam, dengan disparitas yang cukup tinggi antara nilai tertinggi dan terendah. Dari Gambar 13 terlihat bahwa terdapat 16 kabupaten/kota yang angka persentase rumah layak huninya berada di atas Jawa Barat, sedangkan sisanya sebanyak 11 kabupaten/kota masih di bawah Jawa Barat.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret 2025

Gambar 14
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni
di Jawa Barat, 2025

Tiga kabupaten yang memiliki persentase tertinggi rumah tangga yang menempati rumah layak huni adalah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Subang, sedangkan yang memiliki nilai terendah adalah Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut. Perbedaan

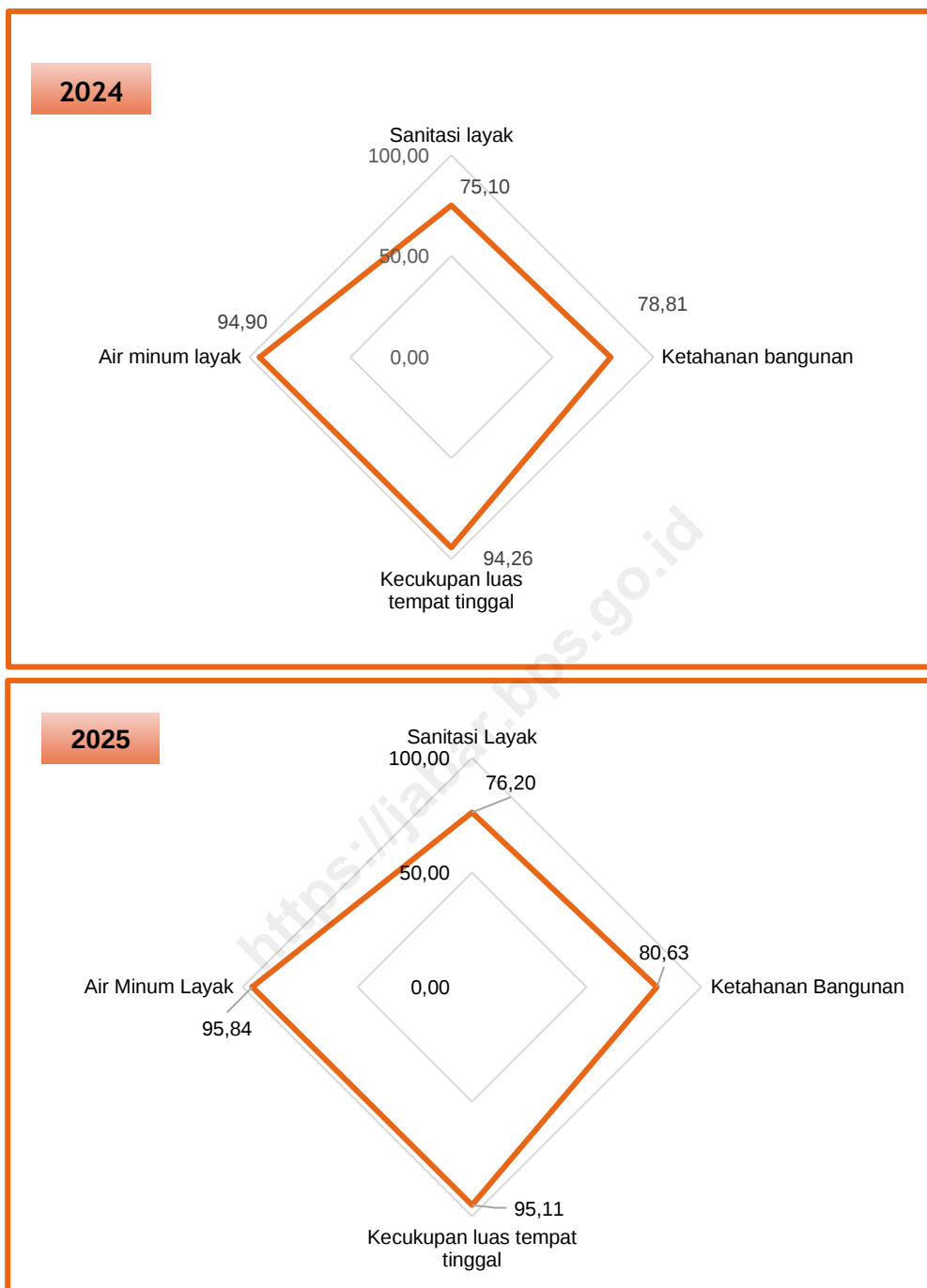
atau disparitas antara nilai tertinggi (Kabupaten Indramayu: 86,84 persen) dengan nilai terendah (Kota Sukabumi: 34,93 persen) sebesar 51,91 poin.

5.2 Kriteria/Komponen Rumah Layak Huni

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa indikator rumah layak huni dibangun dari empat kriteria/komponen, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum dan memiliki akses sanitasi layak. Apabila satu saja dari empat indikator pada suatu rumah tidak memenuhi syarat maka bisa dikatakan rumah tersebut tidak layak huni.

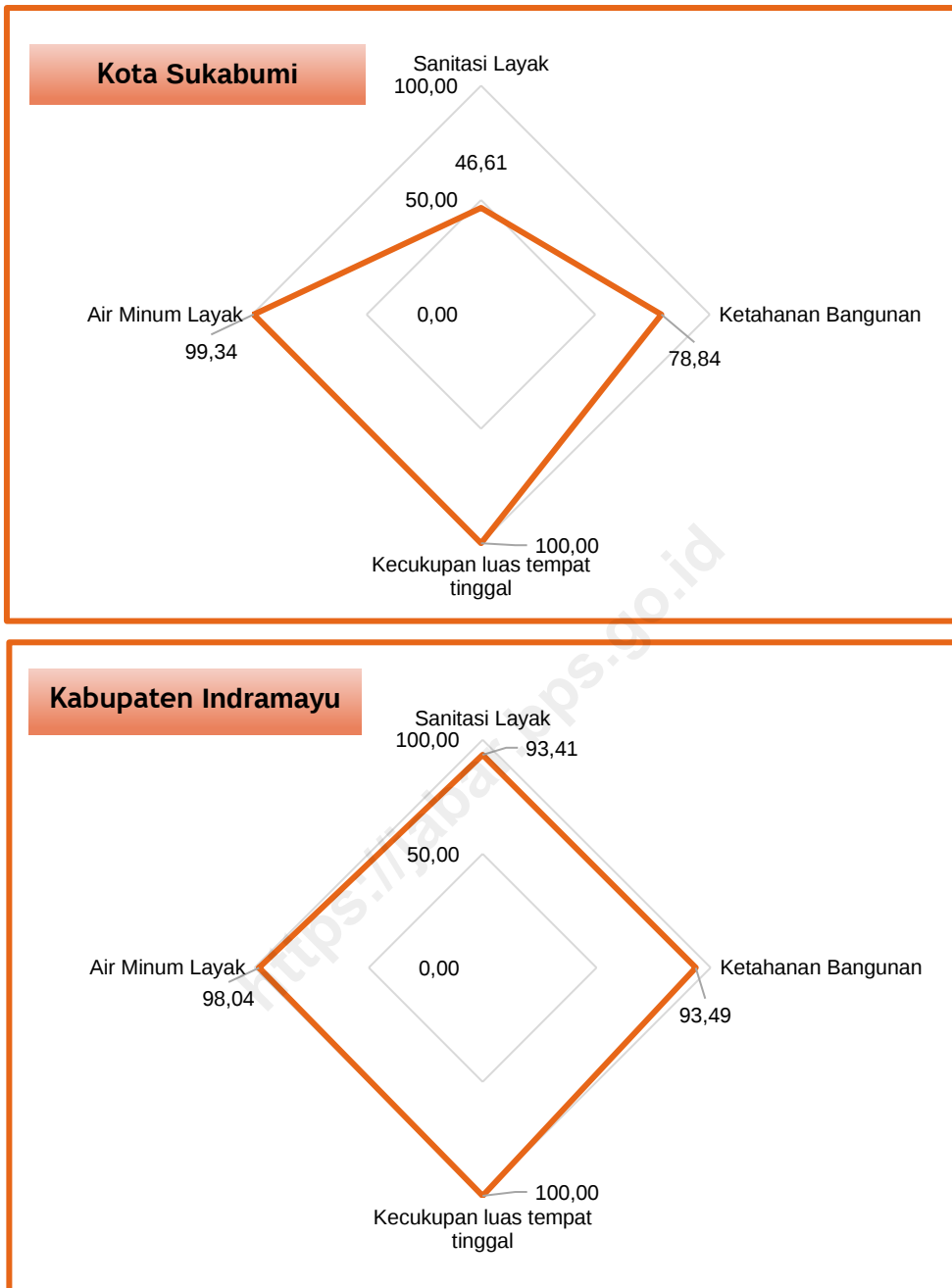
Pada tahun 2024 dan 2025, komponen rumah layak huni yang nilainya lebih dari 90 persen adalah kecukupan luas tempat tinggal dan kepemilikan akses air minum layak. Pada tahun 2025, untuk kecukupan luas tempat tinggal mayoritas kabupaten dan kota sudah berada di atas 90 persen. Hanya 3 (tiga) kabupaten/kota yang angkanya di bawah 90 persen yaitu Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Untuk komponen sanitasi layak nilainya masih di bawah 80 persen. Hal ini disebabkan mayoritas kabupaten/kota persentasenya rendah, dan hanya 9 (tujuh) kabupaten/kota yang di atas 90 persen.

Gambar 15 menunjukkan bahwa semua komponen rumah layak huni mengalami peningkatan persentase dari tahun 2024 ke 2025, hal ini berdampak pada peningkatan angka yang menyebabkan naiknya jumlah rumah layak huni di Jawa Barat.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024–2025

Gambar 15
Komponen Rumah Layak Huni di Jawa Barat, 2024–2025



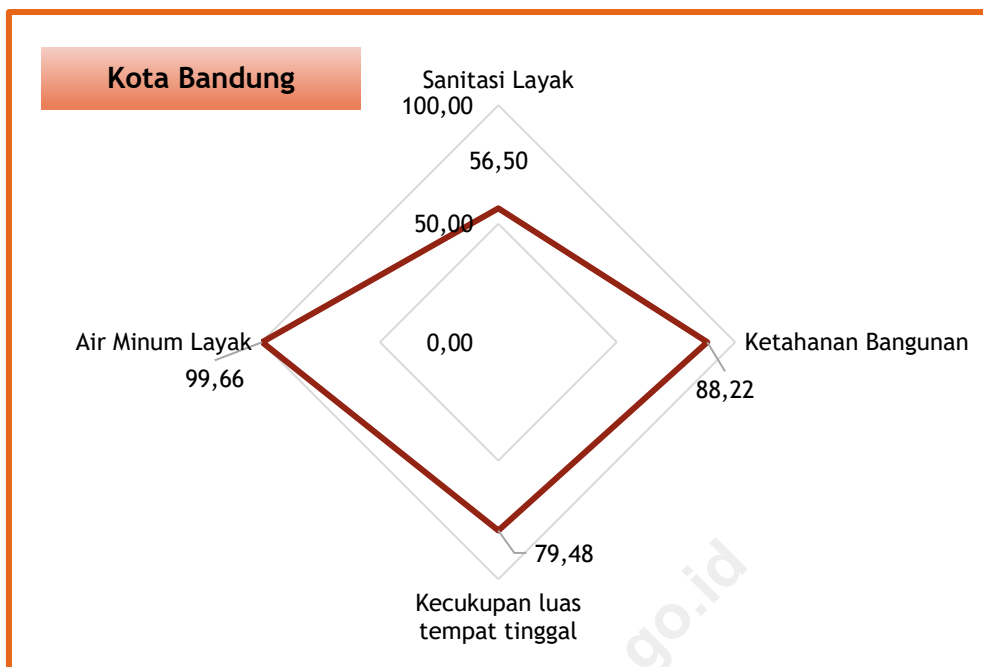
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 16
Komponen Rumah Layak Huni di Kota Sukabumi dan
Kabupaten Indramayu, 2025

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Indramayu memiliki persentase rumah layak huni tertinggi di Jawa Barat, sebaliknya Kota Sukabumi memiliki persentase terendah. Gambar 16 menunjukkan adanya perbedaan nilai dari setiap komponen yang sangat signifikan, terutama komponen sanitasi layak. Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di Kota Sukabumi sebesar 46,61 persen, yang berarti sekitar separuh rumah tangga di Kota Sukabumi tidak memiliki akses sanitasi layak. Berbeda dengan Kota Sukabumi, di Kabupaten Indramayu, sebanyak 93,41 persen telah memiliki akses sanitasi layak. Untuk komponen lainnya, di Kota Sukabumi, indikator air minum layak dan kecukupan luas tempat tinggal memiliki nilai lebih dari 90 persen.

Selanjutnya jika dibandingkan antara Kabupaten Indramayu dengan Kota Bandung yang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Barat perbedaannya juga cukup signifikan. Tidak berbeda dengan Kota Sukabumi, persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak juga sangat rendah yaitu hanya sebesar 56,50 persen. Selain itu, persentase rumah tangga yang memiliki kecukupan luas tempat tinggal hanya sebesar 79,48 persen. Dibandingkan dengan Kabupaten Indramayu, nilai ini masih rendah. Untuk Kota Bandung hal ini mungkin wajar, karena sebagai kota besar, terdapat kendala untuk masyarakat dalam membangun atau tinggal di rumah dengan luas rumah yang cukup, mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki atau tidak ada pilihan untuk tinggal di tempat yang lebih luas.

Secara umum, komponen rumah layak huni kabupaten/kota yang persentasenya sudah cukup tinggi adalah kecukupan luas tempat tinggal dan akses air minum layak. Sedangkan, komponen yang masih membutuhkan perhatian serius adalah ketahanan bangunan dan akses sanitasi layak. Untuk sanitasi layak hal ini terjadi dikarenakan masih ada kabupaten/kota yang nilainya dibawah 50 persen adalah Kota Sukabumi. Sedangkan untuk ketahanan bangunan tidak ada yang nilainya dibawah 50 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Gambar 17
Komponen Rumah Layak Huni di Kota Bandung, 2025

DAFTAR PUSTAKA



<https://jurnal.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR. (2020). Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Jakarta:Kementerian PUPR.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Peringatan Hari Perumahan Nasional 2023, PUPR Tingkatkan Kolaborasi untuk Penyediaan Perumahan Rakyat. Jakarta: <https://pu.go.id/berita/peringatan-hari-perumahan-nasional-2023-pupr-tingkatkan-kolaborasi-untuk-penyediaan-perumahan-rakyat>.
- BPS. (2023). Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2024). Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2025). Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2023). Statistik Perumahan Provinsi Jawa Barat 2022. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- BPS. (2024). Statistik Perumahan Provinsi Jawa Barat 2023. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- BPS. (2025). Statistik Perumahan Provinsi Jawa Barat 2024. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). Presiden:Pemerintah Indonesia Berupaya Keras Sediakan Rumah Layak Huni bagi Warganya. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-pemerintah-indonesia-berupaya-keras-sediakan-rumah-layak-huni-bagi-warganya>
- Kementerian Sekretariat Negara. (2023). Buka Sector Ministers' Meeting Sanitation and Water for All 2023, Wapres Tegaskan Tiga Strategi Hadapi Tantangan Global Sanitasi dan Air Minum. https://www.setneg.go.id/baca/index/buka_sector_ministers_meetin

g_sanitation_and_water_for_all_2023_wapres_tegaskan_tiga_strategi_hadapi_tantangan_global_sanitasi_dan_air_minum.

Kementerian Kesehatan. (2017). Sosialisasi "GERMAS" Dengan Pendekatan Lima Pilar STBM ke Masyarakat Untuk Daerah Perairan di Kalteng.

<http://stbm.kemkes.go.id/app/news/11900/sosialisasi-germas-dengan-pendekatan-lima-pilar-stbm-ke-masyarakat-untuk-daerah-perairan-di-kalteng>.

Kementerian PPN/Bappenas. (2023). Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Sosial Edisi II 2023 (II, 2023). Kementerian PPN/Bappenas.

UN Habitat. (2018). *Metadata on SDGs Indicator 11.1.1*. UN Habitat.

Kementerian PPN/ Bappenas. (2025). Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Kementerian PPN/Bappenas.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Republik Indonesia. (2023). Peraturan dalam Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.

LAMPIRAN



Lampiran 1
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan
Bangunan di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Status Kepemilikan Bangunan				
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas/ Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Bogor	87,66	4,94	6,98	NA	100,00
Kab. Sukabumi	90,96	1,02	7,93	NA	100,00
Kab. Cianjur	91,27	2,15	6,59	–	100,00
Kab. Bandung	80,03	5,48	13,28	1,21	100,00
Kab. Garut	92,17	1,71	6,13	–	100,00
Kab. Tasikmalaya	91,95	1,34	6,72	–	100,00
Kab. Ciamis	93,59	0,95	5,46	–	100,00
Kab. Kuningan	90,87	0,38	8,74	–	100,00
Kab. Cirebon	78,97	3,07	17,96	–	100,00
Kab. Majalengka	88,91	1,27	9,82	–	100,00
Kab. Sumedang	91,05	1,63	7,33	–	100,00
Kab. Indramayu	83,15	1,47	15,02	0,35	100,00
Kab. Subang	95,07	1,75	2,77	0,41	100,00
Kab. Purwakarta	91,50	2,92	4,90	0,67	100,00
Kab. Karawang	89,80	2,70	7,30	0,21	100,00
Kab. Bekasi	84,45	5,32	10,24	–	100,00
Kab. Bandung Barat	85,11	2,67	11,48	0,73	100,00
Kab. Pangandaran	96,23	0,77	3,00	–	100,00
Kota Bogor	68,89	9,73	20,99	0,38	100,00
Kota Sukabumi	75,35	10,66	14,00	–	100,00
Kota Bandung	55,79	17,16	26,87	0,18	100,00
Kota Cirebon	63,33	5,11	31,56	–	100,00
Kota Bekasi	72,55	12,90	14,55	–	100,00
Kota Depok	74,41	15,36	10,21	0,02	100,00
Kota Cimahi	59,49	18,19	17,44	4,89	100,00
Kota Tasikmalaya	82,27	5,98	11,60	0,15	100,00
Kota Banjar	90,47	3,33	6,20	–	100,00
Jawa Barat	83,54	5,36	10,81	0,29	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025
Catatan: NA =RSE > 50%, nilai estimasi dianggap sangat tidak akurat

Lampiran 2
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/kota dan Jenis Atap Terluas
di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Jenis Atap Terluas					Total
	Beton	Genteng	Seng/ Kayu sirap	Asbes	Bambu/Jerami/ Ijuk/ Daun/ Rumbia/ Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Bogor	3,91	65,66	2,13	27,74	NA	100,00
Kab. Sukabumi	2,73	78,79	0,57	17,62	NA	100,00
Kab. Cianjur	1,99	81,42	2,20	14,39	–	100,00
Kab. Bandung	8,28	84,33	1,01	6,38	–	100,00
Kab. Garut	6,13	87,03	0,53	6,20	NA	100,00
Kab. Tasikmalaya	3,65	89,05	0,60	6,54	NA	100,00
Kab. Ciamis	2,15	93,68	0,22	3,95	–	100,00
Kab. Kuningan	2,57	95,46	1,06	0,91	–	100,00
Kab. Cirebon	2,80	93,97	0,62	2,61	–	100,00
Kab. Majalengka	1,37	97,62	0,01	1,01	–	100,00
Kab. Sumedang	3,26	92,14	0,51	4,10	–	100,00
Kab. Indramayu	1,00	93,56	0,40	5,03	–	100,00
Kab. Subang	1,27	94,12	0,64	3,96	–	100,00
Kab. Purwakarta	1,64	89,42	0,91	8,03	–	100,00
Kab. Karawang	2,63	83,64	1,89	11,61	NA	100,00
Kab. Bekasi	2,62	74,21	0,78	21,79	0,60	100,00
Kab. Bandung Barat	4,22	84,84	1,07	9,37	NA	100,00
Kab. Pangandaran	1,38	79,60	0,77	17,57	0,68	100,00
Kota Bogor	5,51	53,91	7,24	32,33	1,00	100,00
Kota Sukabumi	2,38	69,55	7,06	19,60	1,41	100,00
Kota Bandung	13,63	69,86	4,74	11,78	–	100,00
Kota Cirebon	1,88	78,68	4,99	14,45	NA	100,00
Kota Bekasi	2,11	58,09	4,29	35,51	–	100,00
Kota Depok	4,38	49,91	0,76	44,94	–	100,00
Kota Cimahi	10,96	72,49	1,33	14,91	NA	100,00
Kota Tasikmalaya	8,22	84,47	1,26	6,06	–	100,00
Kota Banjar	1,49	94,89	1,56	2,06	–	100,00
Jawa Barat	4,09	78,49	1,62	15,59	0,21	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Catatan: NA =RSE > 50%, nilai estimasi dianggap sangat tidak akurat

Lampiran 3
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding
Terluas di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Jenis Dinding Terluas			Total
	Tembok	Plesteran Anyaman Bambu/Kawat/ Kayu/Papan/ Batang Kayu	Bambu/ Anyaman Bambu/ Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Bogor	97,61	1,26	1,14	100,00
Kab. Sukabumi	84,07	10,32	5,61	100,00
Kab. Cianjur	63,62	19,07	17,30	100,00
Kab. Bandung	87,85	8,09	4,06	100,00
Kab. Garut	71,85	14,31	13,85	100,00
Kab. Tasikmalaya	76,34	14,33	9,33	100,00
Kab. Ciamis	83,45	11,94	4,61	100,00
Kab. Kuningan	97,98	1,72	NA	100,00
Kab. Cirebon	98,24	1,62	NA	100,00
Kab. Majalengka	95,46	3,02	1,52	100,00
Kab. Sumedang	84,41	8,69	6,90	100,00
Kab. Indramayu	95,47	4,39	NA	100,00
Kab. Subang	93,93	5,69	NA	100,00
Kab. Purwakarta	91,39	3,88	4,73	100,00
Kab. Karawang	92,59	2,91	4,50	100,00
Kab. Bekasi	97,09	2,36	NA	100,00
Kab. Bandung Barat	79,07	16,94	3,99	100,00
Kab. Pangandaran	78,78	19,01	2,21	100,00
Kota Bogor	99,47	0,53	–	100,00
Kota Sukabumi	96,43	3,42	NA	100,00
Kota Bandung	98,04	1,96	–	100,00
Kota Cirebon	99,25	0,75	–	100,00
Kota Bekasi	99,33	0,67	–	100,00
Kota Depok	99,70	0,30	–	100,00
Kota Cimahi	99,72	0,28	–	100,00
Kota Tasikmalaya	95,74	4,07	0,19	100,00
Kota Banjar	88,15	10,38	1,46	100,00
Jawa Barat	90,76	5,85	3,39	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Catatan: NA =RSE > 50%, nilai estimasi dianggap sangat tidak akurat

Lampiran 4
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai
Terluas di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Jenis Lantai Terluas					Total
	Marmer/ Granit	Keramik/ Ubin/Tegel /Teraso/ Parket/ Vinil/ Karpét	Kayu/ Papan	Semen /Bata Merah	Bambu/ Tanah/ Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Bogor	2,64	88,16	0,44	8,46	NA	100,00
Kab. Sukabumi	1,27	78,54	6,36	9,58	4,25	100,00
Kab. Cianjur	0,80	60,48	25,70	8,38	4,65	100,00
Kab. Bandung	3,05	82,28	5,88	8,42	NA	100,00
Kab. Garut	2,67	70,17	18,06	8,67	NA	100,00
Kab. Tasikmalaya	1,43	76,75	12,55	8,57	NA	100,00
Kab. Ciamis	0,97	86,09	2,82	9,23	NA	100,00
Kab. Kuningan	2,27	90,90	NA	6,64	–	100,00
Kab. Cirebon	4,14	85,63	NA	8,64	1,37	100,00
Kab. Majalengka	3,14	92,19	0,84	3,82	NA	100,00
Kab. Sumedang	3,45	75,56	6,63	12,44	1,93	100,00
Kab. Indramayu	4,31	80,33	–	13,02	2,34	100,00
Kab. Subang	1,05	90,52	NA	7,55	NA	100,00
Kab. Purwakarta	5,05	85,50	4,68	4,42	NA	100,00
Kab. Karawang	2,85	86,97	NA	6,15	3,95	100,00
Kab. Bekasi	4,16	91,99	NA	2,08	1,60	100,00
Kab. Bandung Barat	1,28	73,42	16,29	8,62	NA	100,00
Kab. Pangandaran	3,00	87,37	2,72	6,82	NA	100,00
Kota Bogor	6,19	88,73	NA	5,07	–	100,00
Kota Sukabumi	2,95	87,45	–	9,45	NA	100,00
Kota Bandung	4,26	92,31	0,74	2,68	NA	100,00
Kota Cirebon	3,11	92,04	–	4,82	NA	100,00
Kota Bekasi	6,19	92,77	–	1,03	–	100,00
Kota Depok	7,63	90,99	–	1,25	NA	100,00
Kota Cimahi	3,16	93,69	NA	2,89	NA	100,00
Kota Tasikmalaya	2,73	86,48	0,52	10,23	NA	100,00
Kota Banjar	1,46	81,86	–	16,66	NA	100,00
Jawa Barat	3,30	84,56	4,30	6,70	1,14	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025
Catatan: NA =RSE > 50%, nilai estimasi dianggap sangat tidak akurat

Lampiran 5
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum
Utama di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum Utama						Total
	Air kemasan bermerk/ Air isi ulang	Leding	Sumur bor/ Pompa	Sumur terlindung/ Tidak terlindung	Mata air terlindung/ Air Hujan	Mata Air Tak Terlindung/ Air Permukaan/ Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab. Bogor	38,58	1,67	23,39	28,55	7,81	1,54	100,00
Kab. Sukabumi	28,81	8,29	12,93	38,14	11,83	4,57	100,00
Kab. Cianjur	29,00	1,55	18,28	31,03	20,14	7,02	100,00
Kab. Bandung	63,96	3,31	13,16	12,31	7,25	0,05	100,00
Kab. Garut	25,14	4,98	17,28	23,11	29,49	8,01	100,00
Kab. Tasikmalaya	29,18	1,08	30,27	16,79	22,68	7,98	100,00
Kab. Ciamis	34,20	3,67	24,81	22,27	15,05	1,46	100,00
Kab. Kuningan	17,35	12,64	38,45	13,60	17,96	NA	100,00
Kab. Cirebon	68,86	8,31	14,85	6,83	1,15	–	100,00
Kab. Majalengka	42,19	2,37	26,82	7,19	21,44	1,94	100,00
Kab. Sumedang	40,94	7,65	8,66	16,18	26,57	2,07	100,00
Kab. Indramayu	79,94	10,51	8,67	0,88	–	–	100,00
Kab. Subang	49,37	8,76	27,21	8,41	6,26	–	100,00
Kab. Purwakarta	35,81	6,11	18,51	28,77	10,80	2,80	100,00
Kab. Karawang	73,58	0,85	24,25	1,32	–	–	100,00
Kab. Bekasi	86,76	0,83	11,03	1,37	–	–	100,00
Kab. Bandung Barat	35,80	5,44	15,23	21,56	21,98	3,43	100,00
Kab. Pangandaran	51,56	1,70	10,88	26,56	9,29	6,07	100,00
Kota Bogor	50,91	31,96	11,39	4,28	1,46	–	100,00
Kota Sukabumi	50,91	6,42	34,82	7,85	–	–	100,00
Kota Bandung	86,28	4,30	8,41	0,76	0,26	–	100,00
Kota Cirebon	48,26	46,55	3,19	2,01	–	–	100,00
Kota Bekasi	78,33	0,74	20,71	0,21	–	–	100,00
Kota Depok	56,55	1,81	33,87	7,76	–	–	100,00
Kota Cimahi	78,33	4,49	15,73	1,46	–	–	100,00
Kota Tasikmalaya	58,33	4,97	18,61	17,74	0,36	–	100,00
Kota Banjar	63,14	3,03	7,51	26,07	0,25	NA	100,00
Jawa Barat	54,07	4,77	18,71	13,92	8,53	1,79	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Catatan: NA =RSE > 50%, nilai estimasi dianggap sangat tidak akurat

Lampiran 6
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jarak Sumber Air
Minum Utama ke Tempat Penampungan Limbah/ Kotoran/Tinja Terdekat
di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Jarak Sumber Air Minum Utama ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat			
	<10 meter	≥10 meter	Tidak Tahu	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Bogor	40,66	53,38	5,96	100,00
Kab. Sukabumi	32,93	61,79	5,27	100,00
Kab. Cianjur	39,28	54,88	5,84	100,00
Kab. Bandung	20,59	74,10	5,31	100,00
Kab. Garut	33,56	57,55	8,89	100,00
Kab. Tasikmalaya	35,63	62,15	2,22	100,00
Kab. Ciamis	28,62	71,24	0,13	100,00
Kab. Kuningan	32,19	67,23	0,58	100,00
Kab. Cirebon	43,04	50,61	6,34	100,00
Kab. Majalengka	36,29	61,43	2,28	100,00
Kab. Sumedang	19,16	78,06	2,78	100,00
Kab. Indramayu	38,30	34,38	27,32	100,00
Kab. Subang	40,38	51,31	8,31	100,00
Kab. Purwakarta	32,60	58,50	8,90	100,00
Kab. Karawang	43,87	53,32	2,82	100,00
Kab. Bekasi	55,07	38,83	6,11	100,00
Kab. Bandung Barat	36,46	59,51	4,03	100,00
Kab. Pangandaran	23,72	75,43	0,85	100,00
Kota Bogor	32,35	62,50	5,15	100,00
Kota Sukabumi	36,57	51,99	11,43	100,00
Kota Bandung	16,31	71,75	11,94	100,00
Kota Cirebon	40,63	59,37	–	100,00
Kota Bekasi	39,85	51,24	8,90	100,00
Kota Depok	41,41	56,23	2,36	100,00
Kota Cimahi	38,42	58,11	3,47	100,00
Kota Tasikmalaya	45,03	52,08	2,89	100,00
Kota Banjar	35,12	64,34	0,53	100,00
Jawa Barat	35,86	58,86	5,28	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Lampiran 7
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Akses Terhadap Air Minum Layak dan di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Akses Air Minum Layak		
	Tidak layak	Layak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Bogor	3,74	96,26	100,00
Kab. Sukabumi	9,74	90,26	100,00
Kab. Cianjur	13,27	86,73	100,00
Kab. Bandung	0,92	99,08	100,00
Kab. Garut	11,61	88,39	100,00
Kab. Tasikmalaya	15,21	84,79	100,00
Kab. Ciamis	5,77	94,23	100,00
Kab. Kuningan	0,89	99,11	100,00
Kab. Cirebon	2,21	97,79	100,00
Kab. Majalengka	3,82	96,18	100,00
Kab. Sumedang	3,70	96,30	100,00
Kab. Indramayu	1,96	98,04	100,00
Kab. Subang	0,27	99,73	100,00
Kab. Purwakarta	7,11	92,89	100,00
Kab. Karawang	2,70	97,30	100,00
Kab. Bekasi	1,71	98,29	100,00
Kab. Bandung Barat	8,67	91,33	100,00
Kab. Pangandaran	12,36	87,64	100,00
Kota Bogor	0,00	100,00	100,00
Kota Sukabumi	0,66	99,34	100,00
Kota Bandung	0,34	99,66	100,00
Kota Cirebon	0,89	99,11	100,00
Kota Bekasi	0,10	99,90	100,00
Kota Depok	0,36	99,64	100,00
Kota Cimahi	0,68	99,32	100,00
Kota Tasikmalaya	2,07	97,93	100,00
Kota Banjar	3,20	96,80	100,00
Jawa Barat	4,16	95,84	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Lampiran 8
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan
Fasilitas Tempat Buang Air Besar (BAB) di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Fasilitas Tempat Buang Air Besar (BAB)				Total
	Ada, digunakan hanya ART sendiri	Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu	Ada, di MCK komunal/ umum/ siapapun menggunakan	Ada, ART tidak menggunakan/ tidak ada fasilitas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Bogor	92,93	4,53	1,26	1,28	100,00
Kab. Sukabumi	90,48	–	9,52	–	100,00
Kab. Cianjur	90,08	4,69	3,27	1,95	100,00
Kab. Bandung	89,78	8,20	2,02	–	100,00
Kab. Garut	85,85	4,61	7,95	1,59	100,00
Kab. Tasikmalaya	83,11	8,09	8,35	NA	100,00
Kab. Ciamis	93,25	4,41	2,34	–	100,00
Kab. Kuningan	91,59	6,32	0,13	1,96	100,00
Kab. Cirebon	76,88	20,96	0,30	1,87	100,00
Kab. Majalengka	87,75	8,91	1,67	1,67	100,00
Kab. Sumedang	95,06	–	4,94	–	100,00
Kab. Indramayu	85,46	11,79	0,83	1,93	100,00
Kab. Subang	94,20	4,73	1,07	–	100,00
Kab. Purwakarta	92,31	5,31	0,68	1,70	100,00
Kab. Karawang	92,80	1,22	1,99	3,99	100,00
Kab. Bekasi	94,95	–	5,05	–	100,00
Kab. Bandung Barat	87,75	7,09	5,11	NA	100,00
Kab. Pangandaran	96,53	0,79	2,67	–	100,00
Kota Bogor	91,87	4,67	3,46	–	100,00
Kota Sukabumi	88,70	7,07	4,14	NA	100,00
Kota Bandung	86,08	13,17	0,75	–	100,00
Kota Cirebon	83,79	14,47	1,23	NA	100,00
Kota Bekasi	98,46	1,32	0,22	–	100,00
Kota Depok	98,41	1,25	NA	–	100,00
Kota Cimahi	88,19	11,12	NA	–	100,00
Kota Tasikmalaya	88,99	2,48	8,28	NA	100,00
Kota Banjar	96,34	3,19	NA	–	100,00
Jawa Barat	90,78	5,48	2,94	0,80	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Catatan: NA =RSE > 50%, nilai estimasi dianggap sangat tidak akurat

Lampiran 9
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset yang digunakan di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Jenis kloset yang digunakan			
	Leher angsa	Plengsengan	Cemplung/cubluk	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Bogor	97,07	2,12	0,81	100,00
Kab. Sukabumi	95,99	2,92	1,09	100,00
Kab. Cianjur	93,86	2,57	3,57	100,00
Kab. Bandung	99,24	0,65	0,11	100,00
Kab. Garut	89,97	2,32	7,71	100,00
Kab. Tasikmalaya	90,69	3,62	5,69	100,00
Kab. Ciamis	96,77	1,11	2,13	100,00
Kab. Kuningan	99,78	NA	NA	100,00
Kab. Cirebon	98,74	1,01	NA	100,00
Kab. Majalengka	98,15	NA	NA	100,00
Kab. Sumedang	99,25	NA	NA	100,00
Kab. Indramayu	99,40	NA	NA	100,00
Kab. Subang	99,04	NA	NA	100,00
Kab. Purwakarta	100,00	–	–	100,00
Kab. Karawang	97,92	1,11	NA	100,00
Kab. Bekasi	98,93	NA	NA	100,00
Kab. Bandung Barat	96,14	2,57	1,29	100,00
Kab. Pangandaran	98,24	0,74	1,01	100,00
Kota Bogor	99,73	NA	NA	100,00
Kota Sukabumi	98,27	1,56	NA	100,00
Kota Bandung	96,78	3,22	–	100,00
Kota Cirebon	100,00	–	–	100,00
Kota Bekasi	98,57	1,43	–	100,00
Kota Depok	98,56	1,44	–	100,00
Kota Cimahi	99,66	NA	–	100,00
Kota Tasikmalaya	99,28	NA	NA	100,00
Kota Banjar	98,57	NA	NA	100,00
Jawa Barat	97,38	1,43	1,18	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Catatan: NA =RSE > 50%, nilai estimasi dianggap sangat tidak akurat

Lampiran 10
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat
Pembuangan Akhir Tinja di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Tempat Pembuangan Akhir Tinja					Total
	Tangki septik	IPAL	Kolam/sawah/sungai/danau/laut	Lubang tanah	Pantai/Tanah Lapang/Kebun, Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Bogor	68,71	1,08	17,58	12,57	NA	100,00
Kab. Sukabumi	49,29	NA	8,11	42,31	–	100,00
Kab. Cianjur	48,59	–	29,25	22,15	–	100,00
Kab. Bandung	71,41	NA	23,77	4,76	–	100,00
Kab. Garut	50,98	0,64	33,12	14,65	NA	100,00
Kab. Tasikmalaya	57,54	NA	31,97	9,61	–	100,00
Kab. Ciamis	66,23	–	16,46	17,13	NA	100,00
Kab. Kuningan	88,80	–	7,50	3,70	–	100,00
Kab. Cirebon	93,75	–	3,82	2,43	–	100,00
Kab. Majalengka	83,66	NA	13,87	1,81	NA	100,00
Kab. Sumedang	82,03	1,16	1,77	15,03	–	100,00
Kab. Indramayu	95,08	–	3,84	0,97	0,12	100,00
Kab. Subang	85,05	NA	3,39	11,45	NA	100,00
Kab. Purwakarta	58,81	0,92	6,12	34,15	–	100,00
Kab. Karawang	92,59	–	5,20	1,47	0,75	100,00
Kab. Bekasi	93,11	1,38	3,08	2,42	–	100,00
Kab. Bandung Barat	46,83	NA	10,24	41,99	NA	100,00
Kab. Pangandaran	91,11	–	3,11	5,78	–	100,00
Kota Bogor	75,78	1,21	21,20	1,82	–	100,00
Kota Sukabumi	48,79	–	49,69	1,15	NA	100,00
Kota Bandung	43,17	15,19	41,64	–	–	100,00
Kota Cirebon	88,76	5,42	5,83	–	–	100,00
Kota Bekasi	99,58	–	NA	NA	–	100,00
Kota Depok	99,12	–	0,88	–	–	100,00
Kota Cimahi	74,27	5,74	19,99	–	–	100,00
Kota Tasikmalaya	61,34	NA	35,36	2,84	–	100,00
Kota Banjar	93,60	–	6,04	NA	–	100,00
Jawa Barat	74,56	1,32	14,31	9,70	0,11	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Catatan: NA =RSE > 50%, nilai estimasi dianggap sangat tidak akurat

Lampiran 11
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar Utama
untuk Memasak di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Bahan Bakar Utama untuk Memasak					Total
	Listrik	Elpiji/Gas Kota/Biogas	Kayu bakar	Minyak Tanah/Briket/Arang/Lainnya	Tidak Memasak di Rumah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
Kab. Bogor	NA	97,55	1,77	NA	NA	100,00
Kab. Sukabumi	1,36	92,58	5,89	–	NA	100,00
Kab. Cianjur	NA	84,87	14,73	–	NA	100,00
Kab. Bandung	NA	97,55	1,77	NA	NA	100,00
Kab. Garut	0,68	88,48	10,48	NA	NA	100,00
Kab. Tasikmalaya	NA	83,19	16,58	–	NA	100,00
Kab. Ciamis	NA	82,78	16,47	–	–	100,00
Kab. Kuningan	NA	92,88	7,11	–	–	100,00
Kab. Cirebon	NA	98,78	0,66	–	NA	100,00
Kab. Majalengka	NA	94,93	3,85	–	NA	100,00
Kab. Sumedang	NA	91,62	7,68	NA	NA	100,00
Kab. Indramayu	NA	97,73	0,89	–	NA	100,00
Kab. Subang	NA	94,49	4,56	–	NA	100,00
Kab. Purwakarta	1,45	94,37	3,88	NA	NA	100,00
Kab. Karawang	1,15	95,80	2,20	–	0,85	100,00
Kab. Bekasi	NA	97,65	0,79	NA	0,86	100,00
Kab. Bandung Barat	NA	93,68	6,14	–	NA	100,00
Kab. Pangandaran	NA	87,56	12,20	–	–	100,00
Kota Bogor	NA	99,91	–	–	0,04	100,00
Kota Sukabumi	NA	99,26	0,21	NA	NA	100,00
Kota Bandung	NA	99,17	–	NA	0,59	100,00
Kota Cirebon	NA	98,90	1,03	–	0,06	100,00
Kota Bekasi	NA	99,21	0,05	NA	NA	100,00
Kota Depok	NA	99,52	–	–	NA	100,00
Kota Cimahi	0,60	98,24	0,31	–	0,85	100,00
Kota Tasikmalaya	NA	96,78	2,11	NA	0,39	100,00
Kota Banjar	NA	92,63	7,16	–	NA	100,00
Jawa Barat	0,45	94,98	4,15	0,10	0,33	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Catatan: NA =RSE > 50%, nilai estimasi dianggap sangat tidak akurat

Lampiran 12
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Akses Terhadap
Sanitasi Layak di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Sanitasi Layak		
	Tidak layak	Layak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Bogor	32,83	67,17	100,00
Kab. Sukabumi	40,75	59,25	100,00
Kab. Cianjur	38,89	61,11	100,00
Kab. Bandung	29,60	70,40	100,00
Kab. Garut	46,65	53,35	100,00
Kab. Tasikmalaya	41,24	58,76	100,00
Kab. Ciamis	24,16	75,84	100,00
Kab. Kuningan	10,62	89,38	100,00
Kab. Cirebon	9,22	90,78	100,00
Kab. Majalengka	18,15	81,85	100,00
Kab. Sumedang	13,23	86,77	100,00
Kab. Indramayu	6,59	93,41	100,00
Kab. Subang	9,44	90,56	100,00
Kab. Purwakarta	25,63	74,37	100,00
Kab. Karawang	13,21	86,79	100,00
Kab. Bekasi	9,76	90,24	100,00
Kab. Bandung Barat	44,05	55,95	100,00
Kab. Pangandaran	6,98	93,02	100,00
Kota Bogor	25,59	74,41	100,00
Kota Sukabumi	53,39	46,61	100,00
Kota Bandung	43,50	56,50	100,00
Kota Cirebon	7,33	92,67	100,00
Kota Bekasi	2,07	97,93	100,00
Kota Depok	2,32	97,68	100,00
Kota Cimahi	20,82	79,18	100,00
Kota Tasikmalaya	43,63	56,37	100,00
Kota Banjar	6,98	93,02	100,00
Jawa Barat	23,80	76,20	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Lampiran 13
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Akses Terhadap
Rumah Layak Huni di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Rumah Layak Huni		
	Tidak layak	Layak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Bogor	52,92	47,08	100,00
Kab. Sukabumi	58,61	41,39	100,00
Kab. Cianjur	63,79	36,21	100,00
Kab. Bandung	41,52	58,48	100,00
Kab. Garut	60,17	39,83	100,00
Kab. Tasikmalaya	56,63	43,37	100,00
Kab. Ciamis	35,46	64,54	100,00
Kab. Kuningan	13,40	86,60	100,00
Kab. Cirebon	16,93	83,07	100,00
Kab. Majalengka	23,56	76,44	100,00
Kab. Sumedang	27,03	72,97	100,00
Kab. Indramayu	13,16	86,84	100,00
Kab. Subang	13,86	86,14	100,00
Kab. Purwakarta	36,45	63,55	100,00
Kab. Karawang	28,56	71,44	100,00
Kab. Bekasi	31,57	68,43	100,00
Kab. Bandung Barat	58,04	41,96	100,00
Kab. Pangandaran	49,31	68,10	100,00
Kota Bogor	65,07	50,69	100,00
Kota Sukabumi	57,64	34,93	100,00
Kota Bandung	27,34	42,36	100,00
Kota Cirebon	39,95	72,66	100,00
Kota Bekasi	47,23	60,05	100,00
Kota Depok	47,23	52,77	100,00
Kota Cimahi	37,62	62,38	100,00
Kota Tasikmalaya	48,78	51,22	100,00
Kota Banjar	16,76	83,24	100,00
Jawa Barat	41,54	58,46	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Hasil Penghitungan *Sampling Error*

Nilai-nilai indikator yang diestimasi dari hasil Susenas Maret 2025 dipengaruhi oleh dua jenis kesalahan (*error*), yaitu *sampling error* dan *non sampling error*. *Non sampling error* adalah kesalahan yang terjadi ketika proses baik pengumpulan maupun pengolahan data. Misalnya kesalahan baik dalam menginterpretasikan pertanyaan-pertanyaan di kuesioner, maupun kesalahan dalam melakukan input data ke komputer.

Sampling error adalah kesalahan yang ditimbulkan dari penggunaan teknik sampling dalam suatu survei. Besarnya *sampling error* secara teori statistik ditunjukkan oleh besarnya angka *standard error* dari suatu angka estimasi persentase suatu variabel yang disajikan dari hasil Susenas 2025. Untuk mengukur presisi dari suatu angka estimasi digunakan besarnya *relative standard error*, yaitu rasio dari nilai *standard error* dengan nilai estimasi suatu variabel, yang dinyatakan dalam persentase (%). Dengan menggunakan selang kepercayaan 95 persen, dapat disajikan estimasi interval (*interval estimation*) dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error* dan batas atas sebesar nilai estimasi ditambah dua *standard error*.

Nilai estimasi sebagai berikut:

- a. $RSE \leq 25\%$ dianggap akurat.
- b. $RSE \geq 25\%$ tetapi $\leq 50\%$ perlu hati-hati jika ingin digunakan.
- c. $RSE > 50\%$, maka nilai estimasi tersebut dianggap sangat tidak akurat.

Penghitungan *sampling error* pada variabel Susenas 2025 menggunakan *software SPSS* versi 20. Variabel yang dihitung *sampling error*-nya terbatas dengan rincian seperti terdapat pada tabel-tabel berikut ini.

Lampiran 14
Relative Standard Error Persentase Rumah Tangga dengan Status
Kepemilikan Rumah Milik Sendiri di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Estimate	Standard Error	95% Confidence Interval		RSE
			Lower	Upper	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Bogor	87,66	1,23	85,24	90,07	1,41
Kab. Sukabumi	90,96	1,08	88,84	93,09	1,19
Kab. Cianjur	91,27	0,97	89,36	93,17	1,07
Kab. Bandung	80,03	1,51	77,06	82,99	1,89
Kab. Garut	92,17	1,05	90,11	94,22	1,14
Kab. Tasikmalaya	91,95	1,09	89,81	94,09	1,19
Kab. Ciamis	93,59	0,97	91,68	95,50	1,04
Kab. Kuningan	90,87	1,22	88,48	93,26	1,34
Kab. Cirebon	78,97	1,64	75,76	82,17	2,07
Kab. Majalengka	88,91	1,21	86,53	91,29	1,37
Kab. Sumedang	91,05	1,07	88,96	93,14	1,17
Kab. Indramayu	83,15	1,56	80,10	86,20	1,87
Kab. Subang	95,07	0,85	93,40	96,74	0,89
Kab. Purwakarta	91,50	1,03	89,48	93,53	1,13
Kab. Karawang	89,80	1,11	87,61	91,98	1,24
Kab. Bekasi	84,45	1,49	81,53	87,37	1,77
Kab. Bandung Barat	85,11	1,37	82,43	87,79	1,61
Kab. Pangandaran	96,23	0,75	94,77	97,70	0,78
Kota Bogor	68,89	2,08	64,82	72,97	3,02
Kota Sukabumi	75,35	1,99	71,44	79,26	2,65
Kota Bandung	55,79	1,97	51,93	59,65	3,53
Kota Cirebon	63,33	2,35	58,72	67,94	3,72
Kota Bekasi	72,55	1,88	68,86	76,23	2,59
Kota Depok	74,41	1,76	70,96	77,86	2,36
Kota Cimahi	59,49	2,16	55,25	63,73	3,63
Kota Tasikmalaya	82,27	1,55	79,23	85,31	1,89
Kota Banjar	90,47	1,46	87,60	93,33	1,62
Jawa Barat	83,54	0,33	82,88	84,20	0,40

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Lampiran 15
Relative Standard Error Persentase Rumah Tangga dengan Status
Kepemilikan Rumah Kontrak/Sewa di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Estimate	Standard Error	95% Confidence Interval		RSE
			Lower	Upper	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Bogor	4,94	0,79	3,39	6,50	16,05
Kab. Sukabumi	1,02	0,41	0,21	1,83	40,61
Kab. Cianjur	2,15	0,46	1,24	3,05	21,45
Kab. Bandung	5,48	0,80	3,91	7,06	14,66
Kab. Garut	1,71	0,40	0,93	2,48	23,15
Kab. Tasikmalaya	1,34	0,49	0,38	2,29	36,37
Kab. Ciamis	0,95	0,31	0,34	1,57	32,98
Kab. Kuningan	0,38	0,16	0,06	0,71	42,55
Kab. Cirebon	3,07	0,63	1,84	4,31	20,51
Kab. Majalengka	1,27	0,42	0,44	2,09	33,27
Kab. Sumedang	1,63	0,49	0,67	2,58	29,88
Kab. Indramayu	1,47	0,53	0,43	2,52	36,17
Kab. Subang	1,75	0,51	0,74	2,76	29,46
Kab. Purwakarta	2,92	0,61	1,73	4,12	20,84
Kab. Karawang	2,70	0,57	1,58	3,82	21,17
Kab. Bekasi	5,32	0,91	3,53	7,10	17,10
Kab. Bandung Barat	2,67	0,58	1,54	3,80	21,63
Kab. Pangandaran	0,77	0,30	0,17	1,36	39,48
Kota Bogor	9,73	1,41	6,97	12,49	14,46
Kota Sukabumi	10,66	1,41	7,89	13,42	13,24
Kota Bandung	17,16	1,47	14,28	20,05	8,57
Kota Cirebon	5,11	1,08	3,00	7,22	21,07
Kota Bekasi	12,90	1,36	10,23	15,57	10,55
Kota Depok	15,36	1,42	12,58	18,13	9,22
Kota Cimahi	18,19	1,67	14,91	21,46	9,19
Kota Tasikmalaya	5,98	0,92	4,18	7,79	15,37
Kota Banjar	3,33	0,83	1,70	4,97	25,05
Jawa Barat	5,36	0,20	4,96	5,76	3,82

Catatan: ■ = RSE ≥ 25% tetapi ≤ 50% perlu hati-hati jika ingin digunakan.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Lampiran 16
Relative Standard Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah
dengan Atap Genteng di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Estimate	Standard Error	95% Confidence Interval		RSE
			Lower	Upper	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Bogor	65,66	1,75	62,23	69,09	2,66
Kab. Sukabumi	78,79	1,61	75,64	81,94	2,04
Kab. Cianjur	81,42	1,53	78,43	84,42	1,88
Kab. Bandung	84,33	1,41	81,57	87,10	1,67
Kab. Garut	87,03	1,30	84,48	89,58	1,49
Kab. Tasikmalaya	89,05	1,23	86,64	91,47	1,38
Kab. Ciamis	93,68	1,16	91,40	95,96	1,24
Kab. Kuningan	95,46	0,86	93,77	97,16	0,90
Kab. Cirebon	93,97	0,99	92,04	95,90	1,05
Kab. Majalengka	97,62	0,60	96,44	98,79	0,61
Kab. Sumedang	92,14	1,08	90,03	94,25	1,17
Kab. Indramayu	93,56	0,97	91,67	95,46	1,03
Kab. Subang	94,12	0,97	92,21	96,02	1,03
Kab. Purwakarta	89,42	1,30	86,88	91,97	1,45
Kab. Karawang	83,64	1,40	80,90	86,39	1,67
Kab. Bekasi	74,21	1,75	70,77	77,64	2,36
Kab. Bandung Barat	84,84	1,46	81,98	87,70	1,72
Kab. Pangandaran	79,60	1,78	76,11	83,10	2,24
Kota Bogor	53,91	2,26	49,48	58,35	4,20
Kota Sukabumi	69,55	2,22	65,19	73,91	3,20
Kota Bandung	69,86	1,83	66,28	73,44	2,61
Kota Cirebon	78,68	2,12	74,53	82,84	2,70
Kota Bekasi	58,09	2,06	54,06	62,12	3,54
Kota Depok	49,91	2,02	45,96	53,87	4,04
Kota Cimahi	72,49	1,92	68,73	76,24	2,64
Kota Tasikmalaya	84,47	1,50	81,53	87,40	1,77
Kota Banjar	94,89	1,06	92,81	96,97	1,12
Jawa Barat	78,49	0,39	77,73	79,25	0,49

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Lampiran 17
Relative Standard Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah
dengan Atap Asbes di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Estimate	Standard Error	95% Confidence Interval		RSE
			Lower	Upper	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Bogor	27,74	1,66	24,49	30,99	5,98
Kab. Sukabumi	17,62	1,48	14,71	20,53	8,42
Kab. Cianjur	14,39	1,41	11,63	17,15	9,79
Kab. Bandung	6,38	0,97	4,49	8,27	15,12
Kab. Garut	6,20	0,97	4,31	8,09	15,57
Kab. Tasikmalaya	6,54	1,01	4,57	8,52	15,41
Kab. Ciamis	3,95	0,95	2,10	5,81	23,94
Kab. Kuningan	0,91	0,30	0,32	1,50	32,95
Kab. Cirebon	2,61	0,73	1,19	4,04	27,87
Kab. Majalengka	1,01	0,39	0,25	1,76	38,47
Kab. Sumedang	4,10	0,89	2,36	5,84	21,64
Kab. Indramayu	5,03	0,84	3,38	6,67	16,69
Kab. Subang	3,96	0,81	2,37	5,56	20,53
Kab. Purwakarta	8,03	1,17	5,73	10,33	14,62
Kab. Karawang	11,61	1,22	9,22	13,99	10,48
Kab. Bekasi	21,79	1,67	18,51	25,06	7,67
Kab. Bandung Barat	9,37	1,19	7,03	11,70	12,72
Kab. Pangandaran	17,57	1,70	14,23	20,90	9,70
Kota Bogor	32,33	2,10	28,21	36,45	6,50
Kota Sukabumi	19,60	1,88	15,91	23,28	9,58
Kota Bandung	11,78	1,22	9,38	14,18	10,40
Kota Cirebon	14,45	1,83	10,86	18,03	12,67
Kota Bekasi	35,51	2,01	31,57	39,46	5,66
Kota Depok	44,94	2,01	40,99	48,88	4,48
Kota Cimahi	14,91	1,52	11,94	17,88	10,16
Kota Tasikmalaya	6,06	0,91	4,27	7,85	15,07
Kota Banjar	2,06	0,69	0,71	3,41	33,41
Jawa Barat	15,59	0,35	24,49	30,99	2,24

Catatan: = RSE $\geq$ 25% tetapi $\leq$ 50% perlu hati-hati jika ingin digunakan.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Lampiran 18
Relative Standard Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah
dengan Dinding Tembok di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Estimate	Standard Error	95% Confidence Interval		RSE
			Lower	Upper	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Bogor	97,61	0,49	96,65	98,57	0,50
Kab. Sukabumi	84,07	1,41	81,31	86,82	1,67
Kab. Cianjur	63,62	1,90	59,91	67,34	2,98
Kab. Bandung	87,85	1,25	85,40	90,30	1,42
Kab. Garut	71,85	1,84	68,24	75,45	2,56
Kab. Tasikmalaya	76,34	1,73	72,95	79,74	2,27
Kab. Ciamis	83,45	1,66	80,20	86,71	1,99
Kab. Kuningan	97,98	0,60	96,80	99,15	0,61
Kab. Cirebon	98,24	0,56	97,14	99,35	0,57
Kab. Majalengka	95,46	0,92	93,66	97,26	0,96
Kab. Sumedang	84,41	1,47	81,53	87,30	1,74
Kab. Indramayu	95,47	0,85	93,80	97,13	0,89
Kab. Subang	93,93	1,07	91,84	96,02	1,14
Kab. Purwakarta	91,39	1,29	88,86	93,91	1,41
Kab. Karawang	92,59	1,04	90,56	94,63	1,12
Kab. Bekasi	97,09	0,73	95,67	98,52	0,75
Kab. Bandung Barat	79,07	1,79	75,58	82,57	2,26
Kab. Pangandaran	78,78	1,83	75,19	82,37	2,32
Kota Bogor	99,47	0,28	98,92	100,01	0,28
Kota Sukabumi	96,43	1,02	94,43	98,42	1,06
Kota Bandung	98,04	0,57	96,92	99,15	0,58
Kota Cirebon	99,25	0,35	98,57	99,93	0,35
Kota Bekasi	99,33	0,40	98,55	100,11	0,40
Kota Depok	99,70	0,20	99,32	100,09	0,20
Kota Cimahi	99,72	0,19	99,35	100,10	0,19
Kota Tasikmalaya	95,74	0,76	94,25	97,22	0,79
Kota Banjar	88,15	1,63	84,96	91,35	1,85
Jawa Barat	90,76	0,24	90,29	91,24	0,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Lampiran 19
Relative Standard Error Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah
dengan Lantai Keramik/Ubun/Tegel/Teraso/Parket/Vinil/Karpet di Jawa Barat,
2025

Kabupaten/Kota	Estimate	Standard Error	95% Confidence Interval		RSE
			Lower	Upper	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Bogor	88,16	1,17	85,86	90,45	1,33
Kab. Sukabumi	78,54	1,58	75,44	81,65	2,01
Kab. Cianjur	60,48	1,97	56,62	64,34	3,26
Kab. Bandung	82,28	1,47	79,40	85,15	1,78
Kab. Garut	70,17	1,86	66,52	73,81	2,65
Kab. Tasikmalaya	76,75	1,72	73,38	80,12	2,24
Kab. Ciamis	86,09	1,52	83,11	89,08	1,77
Kab. Kuningan	90,90	1,29	88,37	93,42	1,42
Kab. Cirebon	85,63	1,46	82,78	88,49	1,70
Kab. Majalengka	92,19	1,18	89,88	94,50	1,28
Kab. Sumedang	75,56	1,81	72,01	79,10	2,40
Kab. Indramayu	80,33	1,69	77,02	83,65	2,11
Kab. Subang	90,52	1,32	87,94	93,11	1,46
Kab. Purwakarta	85,50	1,55	82,47	88,54	1,81
Kab. Karawang	86,97	1,39	84,24	89,69	1,60
Kab. Bekasi	91,99	1,12	89,79	94,19	1,22
Kab. Bandung Barat	73,42	1,93	69,64	77,20	2,63
Kab. Pangandaran	87,37	1,51	84,41	90,34	1,73
Kota Bogor	88,73	1,38	86,02	91,44	1,56
Kota Sukabumi	87,45	1,66	84,20	90,71	1,90
Kota Bandung	92,31	1,05	90,25	94,36	1,14
Kota Cirebon	92,04	1,33	89,42	94,65	1,45
Kota Bekasi	92,77	1,08	90,66	94,88	1,16
Kota Depok	90,99	1,15	88,74	93,24	1,26
Kota Cimahi	93,69	0,99	91,75	95,63	1,06
Kota Tasikmalaya	86,48	1,38	83,78	89,18	1,59
Kota Banjar	81,86	1,97	77,99	85,73	2,41
Jawa Barat	84,56	0,32	83,93	85,20	0,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Lampiran 20
Relative Standard Error Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Utama
Air Minum Berupa Air Kemasan Bermerek/Air Isi Ulang di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Estimate	Standard Error	95% Confidence Interval		RSE
			Lower	Upper	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Bogor	38,58	1,80	35,05	42,11	4,67
Kab. Sukabumi	28,81	1,76	25,35	32,26	6,12
Kab. Cianjur	29,00	1,78	25,51	32,50	6,15
Kab. Bandung	63,96	1,83	60,37	67,56	2,87
Kab. Garut	25,14	1,63	21,96	28,33	6,47
Kab. Tasikmalaya	29,18	1,83	25,59	32,77	6,28
Kab. Ciamis	34,20	2,04	30,20	38,19	5,97
Kab. Kuningan	17,35	1,63	14,15	20,55	9,40
Kab. Cirebon	68,86	1,93	65,07	72,64	2,81
Kab. Majalengka	42,19	2,08	38,12	46,25	4,92
Kab. Sumedang	40,94	1,96	37,09	44,79	4,80
Kab. Indramayu	79,94	1,76	76,49	83,38	2,20
Kab. Subang	49,37	2,16	45,13	53,60	4,38
Kab. Purwakarta	35,81	1,97	31,96	39,66	5,49
Kab. Karawang	73,58	1,80	70,04	77,11	2,45
Kab. Bekasi	86,76	1,44	83,95	89,58	1,66
Kab. Bandung Barat	35,80	1,90	32,08	39,51	5,30
Kab. Pangandaran	51,56	2,30	47,06	56,07	4,46
Kota Bogor	50,91	2,27	46,46	55,35	4,46
Kota Sukabumi	50,91	2,44	46,12	55,69	4,80
Kota Bandung	86,28	1,39	83,54	89,01	1,62
Kota Cirebon	48,26	2,49	43,38	53,14	5,16
Kota Bekasi	78,33	1,70	75,01	81,66	2,17
Kota Depok	56,55	1,99	52,66	60,45	3,52
Kota Cimahi	78,33	1,81	74,78	81,87	2,31
Kota Tasikmalaya	58,33	2,12	54,17	62,49	3,64
Kota Banjar	63,14	2,50	58,24	68,04	3,96
Jawa Barat	54,07	0,43	53,22	54,91	0,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Lampiran 21
Relative Standard Error Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Utama
Air Minum Berupa Sumur Bor/Pompa di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Estimate	Standard Error	95% Confidence Interval		RSE
			Lower	Upper	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Bogor	23,39	1,57	20,31	26,47	6,73
Kab. Sukabumi	12,93	1,32	10,33	15,52	10,23
Kab. Cianjur	18,28	1,55	15,24	21,31	8,47
Kab. Bandung	13,16	1,29	10,63	15,69	9,81
Kab. Garut	17,28	1,56	14,23	20,33	9,01
Kab. Tasikmalaya	30,27	1,90	26,55	33,99	6,27
Kab. Ciamis	24,81	1,95	20,99	28,63	7,86
Kab. Kuningan	38,45	2,27	33,99	42,91	5,92
Kab. Cirebon	14,85	1,46	11,99	17,71	9,82
Kab. Majalengka	26,82	1,93	23,05	30,60	7,18
Kab. Sumedang	8,66	1,07	6,56	10,76	12,39
Kab. Indramayu	8,67	1,26	6,20	11,15	14,57
Kab. Subang	27,21	1,96	23,37	31,05	7,20
Kab. Purwakarta	18,51	1,71	15,16	21,86	9,23
Kab. Karawang	24,25	1,77	20,78	27,72	7,30
Kab. Bekasi	11,03	1,33	8,43	13,64	12,05
Kab. Bandung Barat	15,23	1,45	12,39	18,06	9,50
Kab. Pangandaran	10,88	1,44	8,07	13,70	13,20
Kota Bogor	11,39	1,40	8,65	14,14	12,28
Kota Sukabumi	34,82	2,35	30,21	39,44	6,76
Kota Bandung	8,41	1,13	6,19	10,62	13,45
Kota Cirebon	3,19	0,88	1,46	4,92	27,65
Kota Bekasi	20,71	1,67	17,43	23,99	8,08
Kota Depok	33,87	1,88	30,18	37,56	5,56
Kota Cimahi	15,73	1,56	12,67	18,78	9,91
Kota Tasikmalaya	18,61	1,73	15,21	22,00	9,31
Kota Banjar	7,51	1,36	4,83	10,18	18,18
Jawa Barat	18,71	0,36	18,01	19,42	1,93

Catatan: ■ = RSE ≥ 25% tetapi ≤ 50% perlu hati-hati jika ingin digunakan Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Lampiran 22
Relative Standard Error Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Fasilitas BAB Hanya ART di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Estimate	Standard Error	95% Confidence Interval		RSE
			Lower	Upper	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Bogor	92,93	0,93	91,10	94,76	1,00
Kab. Sukabumi	90,48	1,11	88,31	92,66	1,23
Kab. Cianjur	90,08	1,16	87,80	92,36	1,29
Kab. Bandung	89,78	1,13	87,57	91,98	1,25
Kab. Garut	85,85	1,47	82,97	88,73	1,71
Kab. Tasikmalaya	83,11	1,63	79,91	86,31	1,97
Kab. Ciamis	93,25	1,15	91,00	95,51	1,23
Kab. Kuningan	91,59	1,39	88,88	94,31	1,51
Kab. Cirebon	76,88	1,76	73,44	80,32	2,28
Kab. Majalengka	87,75	1,40	85,00	90,50	1,60
Kab. Sumedang	95,06	0,83	93,44	96,68	0,87
Kab. Indramayu	85,46	1,57	82,39	88,53	1,83
Kab. Subang	94,20	1,01	92,22	96,19	1,07
Kab. Purwakarta	92,31	1,11	90,15	94,48	1,20
Kab. Karawang	92,80	0,99	90,85	94,75	1,07
Kab. Bekasi	94,95	0,91	93,16	96,73	0,96
Kab. Bandung Barat	87,75	1,46	84,88	90,62	1,67
Kab. Pangandaran	96,53	0,71	95,15	97,92	0,73
Kota Bogor	91,87	1,30	89,32	94,42	1,42
Kota Sukabumi	88,70	1,52	85,71	91,68	1,72
Kota Bandung	86,08	1,36	83,42	88,74	1,58
Kota Cirebon	83,79	1,79	80,27	87,30	2,14
Kota Bekasi	98,46	0,49	97,50	99,42	0,50
Kota Depok	98,41	0,62	97,19	99,63	0,63
Kota Cimahi	88,19	1,40	85,44	90,95	1,59
Kota Tasikmalaya	88,99	1,41	86,22	91,75	1,58
Kota Banjar	96,34	0,90	94,57	98,11	0,94
Jawa Barat	90,78	0,26	90,27	91,28	0,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025

Lampiran 23
Relative Standard Error Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kloset Jenis Leher Angsa di Jawa Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Estimate	Standard Error	95% Confidence Interval		RSE
			Lower	Upper	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Kab. Bogor	97,07	0,65	95,80	98,34	0,67
Kab. Sukabumi	95,99	0,75	94,52	97,46	0,78
Kab. Cianjur	93,86	1,11	91,68	96,04	1,19
Kab. Bandung	99,24	0,33	98,60	99,89	0,33
Kab. Garut	89,97	1,20	87,61	92,33	1,34
Kab. Tasikmalaya	90,69	1,23	88,27	93,11	1,36
Kab. Ciamis	96,77	0,88	95,04	98,49	0,91
Kab. Kuningan	99,78	0,13	99,51	100,04	0,13
Kab. Cirebon	98,74	0,43	97,89	99,59	0,44
Kab. Majalengka	98,15	0,48	97,20	99,10	0,49
Kab. Sumedang	99,25	0,44	98,39	100,11	0,44
Kab. Indramayu	99,40	0,32	98,78	100,02	0,32
Kab. Subang	99,04	0,42	98,21	99,87	0,43
Kab. Purwakarta	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Kab. Karawang	97,92	0,65	96,64	99,20	0,67
Kab. Bekasi	98,93	0,46	98,03	99,83	0,47
Kab. Bandung Barat	96,14	0,95	94,28	98,00	0,99
Kab. Pangandaran	98,24	0,51	97,24	99,25	0,52
Kota Bogor	99,73	0,27	99,20	100,25	0,27
Kota Sukabumi	98,27	0,71	96,88	99,67	0,73
Kota Bandung	96,78	0,72	95,37	98,19	0,74
Kota Cirebon	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Kota Bekasi	98,57	0,55	97,49	99,64	0,56
Kota Depok	98,56	0,45	97,67	99,44	0,46
Kota Cimahi	99,66	0,34	99,00	100,32	0,34
Kota Tasikmalaya	99,28	0,39	98,52	100,03	0,39
Kota Banjar	98,57	0,58	97,43	99,70	0,59
Jawa Barat	97,38	0,15	97,09	97,68	0,16

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025



SENSUS
EKONOMI
2026

BerAKHLAK  bangga
melayani
bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. PHH Mustofa No.43, Bandung 40124, Jawa Barat

Telp: 7272595, 7201696; Fax; 7213572

Homepage: <https://jabar.bps.go.id>

Email: bps3200@bps.go.id